



# EDUKASI KONSUMEN

21 Fokus IKNB  
Tergjur Jasa  
Peminjaman Online

32 Telaah Produk  
Investasi untuk PNS

EDISI SEPTEMBER 2015

 *Layanan*  
**1500 655**

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)



## MEMACU INDUSTRI FINANSIAL





# SimPel

## Simpanan Pelajar

\*Setoran Awal Rp 5.000

\*Bebas Biaya Administrasi



# Mengelola Uang Sejak Dini

Tidak henti-hentinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan lembaga keuangan nasional melakukan sosialisasi dan kampanye cara mengelola uang secara bijak. Tujuannya supaya masyarakat mampu mengelola uangnya secara cerdas melalui produk-produk keuangan mulai dari tabungan, deposito, asuransi, hingga investasi di pasar modal.

Program-program yang dijalankan dengan tema besar Literasi Keuangan itu pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen dari penawaran-penawaran investasi yang tidak jelas, yang bisa berujung pada kerugian masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang memahami produk keuangan, maka kasus-kasus investasi bodong dengan iming-iming tingkat pengembalian yang menggiurkan—walaupun tidak rasional—bisa dicegah.

Edukasi produk keuangan itu diwujudkan dalam beberapa program misalnya pengoperasian Mobil Literasi Keuangan (Si Molek), maskot dan jargon literasi keuangan (SiKAPI Uang dengan Bijak), serta mini *website* dan Layanan Konsumen OJK atau *Financial Customer Care* (FCC) di nomor 1-500-655.

Beberapa waktu lalu, OJK membidik kalangan pelajar sebagai sasaran literasi keuangan. Bagi kalangan ini diperkenalkan produk tabungan yang diberi nama Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB). Ini merupakan

salah satu upaya OJK dalam membangkitkan kembali budaya menabung sejak dini bagi pelajar.

Produk ini merupakan tabungan bagi para peserta didik mulai jenjang PAUD/Raudatul Athfal (RA) hingga SMA/Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren yang diterbitkan secara nasional oleh perbankan di Indonesia.

Melalui produk Simpel, para pelajar dapat menjadikan kegiatan menabung bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan kebutuhan atau bahkan gaya hidup. Mereka pun diharapkan tidak menjadi generasi muda yang konsumtif, melainkan pribadi yang mampu membelanjakan uangnya secara bijak.

Gayung pun bersambut. Sejumlah perbankan langsung meluncurkan produk tabungan bagi kalangan pelajar dengan target pembukaan rekening yang cukup ambisius. Dari hitung-hitungan bisnis, jumlah pelajar di Indonesia merupakan pasar yang cukup potensial. Dengan setoran awal yang terjangkau, produk ini berpeluang dijadikan sarana bagi pelajar untuk mulai mempelajari produk keuangan.

Bila partisipasi pelajar terhadap produk ini sangat baik, diharapkan mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang paham produk keuangan dan cermat dalam berinvestasi.

Redaksi menerima kiriman naskah dan berhak mengedit naskah tanpa menghilangkan intisari dari artikel sebelum dipublikasikan

Dewan Pelindung: DR. Muliaman D. Hadad (Ketua Dewan Komisiner OJK) Dewan Penasehat: DR. Kusumaningtuti S. Soetiono, S.H. LLM (Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen), Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Agus Sugiarto (Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan) Redaktur Ahli: Lasmaida S. Gultom (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), Eko Ariantoro (Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan), Anto Prabowo (Kepala Departemen Perlindungan Konsumen), Sondang Martha S. (Direktur Pelayanan Konsumen), Ria Prastiani (Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen), Heni Nugraheni (Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen), Prabowo (Direktur Market Conduct) Redaktur: Greta Joice Siahaan (Plt. Deputi Direktur Literasi dan Informasi) Redaksi: Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Alamat Redaksi: Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK Menara Radius Prawiro Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350 Telepon: (021) 29600000 Faksimili: (021) 3866032 Website: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

# daftar isi

<b>Salam Redaksi</b> Mengelola Uang Sejak Dini	3
<b>Sorotan Utama</b> Antisipasi Dini di Pasar Keuangan untuk Dorong Perekonomian	6
<b>Inspirasi</b> <b>Mulya E. Siregar</b> Berupaya Tingkatkan Peran Perbankan dalam <i>Financial Inclusion</i>	10
<b>Fokus Perbankan</b> Memupuk Kebiasaan Menabung bagi Pelajar	12
<b>Fokus Pasar Modal</b> Pasar Modal Indonesia Dulu dan Kini	16
<b>Fokus IKNB</b> Terguir Jasa Peminjaman <i>Online</i>	21
<b>Perspektif</b> <b>Kepesertaan BPJS Kesehatan</b> Mengakomodasi Skema Syariah	24
<b>Tinjauan Regulasi</b> Relaksasi <i>Loan to Value</i>	26
<b>Fokus Global</b> <b>MOU OJK dan IDB</b> Mendorong Lembaga Mikro Makin Berjaya	28
<b>Telaah Produk</b> Investasi untuk PNS	32
<b>Waspada Investasi</b> Sinergi Kelembagaan, Jadi Benteng Praktik Investasi Ilegal	34
<b>Angka Bicara</b> <b>Call Center 1500-655</b> Pelayanan Konsumen Lebih Efektif, Cepat, dan responsif	37





<b>Muda</b> Asuransi Bagi Pekerja Formal Cukupkah Hanya BPJS?	38
<b>Bisnis Pemula</b> Go-Jek: Dari Mengantar Penumpang Hingga Belanja Barang	40
<b>Seri Pengetahuan Umum-Perbankan</b> Tabungan, apa itu?	42
<b>Seri Pengetahuan Umum-Pasar Modal</b> Mengenal Lebih Dekat Investasi Saham	43
<b>Seri Pengetahuan Umum-IKNB</b> Menyiapkan Jaminan Masa Depan	44
Kebutuhan Asuransi Kesehatan	46

<b>Lembaga Gadai Resmi</b> "Pemahaman Masyarakat Masih Kurang"	47
Perluasan Pembiayaan <i>Multifinance</i>	48
<b>Kabar Otoritas</b>	
• Peluncuran Buku Menjawab Tantangan <i>E-Banking</i>	49
• FGD untuk Menghadang Investasi Ilegal	50
• Penyandang Disabilitas Dapat Kelola Keuangan Secara Benar	52
• Membentuk Penyuluh untuk Komunitas	54
• Kegiatan Menabung Melatih Anak Mengelola Keuangan	56
• "Akses Keuangan Agar Diperluas di Jayapura"	57



# Antisipasi Dini di Pasar Keuangan untuk Dorong Perekonomian

Melihat pertumbuhan ekonomi yang melambat tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak tinggal diam. Otoritas Jasa Keuangan ini berinisiatif mengeluarkan sejumlah stimulus untuk mendorong perekonomian dalam negeri. Apa saja stimulus tersebut?





**K**etua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad mengatakan ada 35 stimulus untuk pasar keuangan yang diluncurkan oleh OJK dalam rangka mendorong perekonomian. Ke-35 kebijakan tersebut mencakup industri perbankan sebanyak 12 kebijakan, pasar modal sekitar 15 kebijakan, dan 4 kebijakan di industri keuangan non-bank (IKNB), serta 4 kebijakan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Dengan sejumlah stimulus tersebut, OJK berharap industri keuangan menjadi lokomotif yang dapat menarik 'rangkainan gerbong' perekonomian nasional berjalan lebih cepat dan stabil guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Muliawan menilai perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini diantaranya dipengaruhi oleh penurunan perekonomian global. Ditambah lagi turunnya permintaan dari berbagai negara ke Indonesia yang membuat melemahnya harga komoditas.

Meskipun lebih banyak dipengaruhi oleh faktor global, bukan berarti OJK turut pasrah. Menurutnya, pasar keuangan Indonesia memerlukan kebijakan yang dapat mengantisipasi dampak lebih jauh. Pasalnya, bila perekonomian melambat dibiarkan begitu saja, akan besar pengaruhnya pada pasar keuangan Indonesia.

Sebanyak 35 stimulus itu, lanjut Muliawan, dapat dikatakan merupakan stimulus pertama yang dikururkan untuk pasar keuangan. "Kami lakukan *early* antisipasi secepatnya, kami siapkan selama bulan puasa dan diumumkan setelah lebaran. Ini untuk memberikan ruang di pasar keuangan," kata Muliawan.

Adapun 35 kebijakan yang diluncurkan merupakan kebijakan yang terdiri dari kebijakan yang diumumkan kembali, kebijakan yang dilonggarkan tapi bersifat sementara, dan kebijakan baru.

Dia menilai, kebijakan-kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi agar sesuai target. Menurut Muliawan, OJK terus memperhatikan hal-hal atau isu-isu yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga kinerja industri keuangan di Indonesia.

Namun, bagaimana pengaruh dari stimulus tersebut untuk jangka pendek, menengah dan panjang? Muliawan menjelaskan stimulus yang dikeluarkan ada yang sudah diimplementasikan, dan ada yang masih dalam proses implementasi.

Di sektor pasar modal misalnya, kebijakan yang diluncurkan adalah pengembangan infrastruktur pasar Repurchase Agreement (REPO), mencakup pengaturan mengenai Repo, pengembangan produk Repo, serta layanan *settlement* transaksi REPO yang dilengkapi *monitoring* dan konsep *3rd party* Repo.

Pengembangan UKM untuk *go public*, mencakup penyusunan ketentuan untuk pengembangan UKM, serta pembuatan papan khusus untuk UKM, dan kebijakan penetapan *Electronic Trading Platform* (ETP), mencakup pengembangan *trading platform* surat

**"OJK terus memperhatikan hal-hal atau isu-isu yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga kinerja industri keuangan di Indonesia."**







Di tengah perlambatan ekonomi, pemerintah tetap menjalankan proyek Mass Rapi Transit (MRT). Alat berat tampak mengangkat besi beton di proyek pembangunan bawah tanah MRT di Jakarta, Kamis (17/09). Pembangunan masih berjalan di tengah kondisi ekonomi menurun.

utang terintegrasi yang digunakan oleh pelaku dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pengawasan.

Kemudian, ada penggunaan bank sentral untuk penyelesaian transaksi, mencakup implementasi penggunaan bank sentral selain penggunaan bank pembayaran untuk layanan jasa penyelesaian dana di pasar modal, rencana penerbitan produk derivatif *Indonesia Government Bond Futures* (IGBF), pengembangan obligasi daerah, dan penggunaan *bond index* surat utang.

Selain itu, ada perluasan investasi di

pasar modal melalui penerbitan EBA-SP, peraturan *fund net* untuk reksadana, penerapan *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) dalam rangka penyediaan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, dan peningkatan BUMN dan anak usaha BUMN yang *go public*.

“Dari internal sudah mengumpulkan anak-anak usaha BUMN dan kita akan perluas sosialisasinya. Sebenarnya minat cukup banyak,” ujar Muliaman.

Lalu, ada implementasi *Electronic Book Building* dalam rangka meningkatkan





## “Banyak emiten yang harga sahamnya sudah turun sangat dalam. Kami menerbitkan ini sebagai langkah untuk penurunan yang lebih jauh lagi, kami optimistis ini akan efektif.”

saat ini. Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sudah terkoreksi hingga 18,80% sejak awal tahun hingga 23 September 2015.

Salah satunya adalah relaksasi melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS). OJK mencatat, sejak dikeluarkannya Surat Edaran No.22/2015 pada 21 Agustus 2015 tentang kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten/perusahaan publik, sudah sekitar 19 perusahaan menyatakan akan melakukan pembelian kembali saham.

Adapun, rencana dana yang akan dikeluarkan oleh 19 emiten tersebut mencapai Rp5 triliun (data per 16 September 2015). “Banyak emiten yang harga sahamnya sudah turun cukup dalam. Kami menerbitkan ini sebagai langkah untuk penurunan yang lebih jauh lagi, kami optimistis ini akan efektif,” jelas Muliaman.

OJK sendiri memiliki tiga harapan dengan diterbitkannya kebijakan-kebijakan baru di pasar keuangan ini. *Pertama*, industri keuangan di Indonesia bisa berperan dalam pembangunan nasional sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat. *Kedua*, diharapkan industri keuangan memiliki daya tahan yang kuat. *Ketiga*, OJK ingin industri


keuangan nasional mampu membuka akses keuangan kepada masyarakat.

### Stimulus Baru

Terkait harapan OJK dengan dikeluarkannya stimulus ini, Muliaman menegaskan OJK menginginkan agar penurunan perekonomian yang terjadi di segala sektor dapat tertahan. Artinya, tidak terjadi penurunan yang lebih dalam lagi.

Apabila kondisi perekonomian masih belum membaik meskipun sejumlah stimulus sudah dikucurkan, OJK tidak segan-segan mengucurkan lagi stimulus baru. Saat ini, ada sejumlah stimulus lain yang masih diproses untuk dikeluarkan bila saatnya sudah tepat. “Masih ada dalam *pipeline* kami, tunggu saja. Kami lihat juga kondisi perekonomian dan pasar saat ini,” tuturnya.

Kebijakan baru tersebut akan menyasar seluruh pasar keuangan. Jadi, bukan hanya diperuntukkan untuk sektor pasar modal atau perbankan. Melainkan pasar keuangan secara keseluruhan mulai dari pasar modal, perbankan, industri keuangan non bank, dan sebagainya.

Dia membocorkan stimulus yang sedang disiapkan tersebut memiliki sasaran membuat pasar semakin percaya diri dan membuka pembiayaan yang lebih banyak lagi. “Salah satu bocorannya adalah soal industri modal ventura untuk *start-up* bisnis. Tunggu saja ya.” 

transparansi dan *fairness* antarinvestor, peraturan terkait pasar modal syariah, penerbitan pedoman tata kelola emiten dan perusahaan publik, serta peraturan segmentasi perizinan wakil perantara pedagang efek (WPPE). Semuanya bertujuan untuk mendorong perekonomian nasional.

Selain mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, OJK juga menerbitkan kebijakan yang berfungsi untuk menahan penurunan yang terjadi di pasar saham

## Mulya E. Siregar

# Berupaya Tingkatkan Peran Perbankan Dalam *Financial Inclusion*



*“Just do the best and then let the rest in God’s hand.”*  
(Lakukanlah yang terbaik dan selanjutnya pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa). Itulah prinsip yang dipegang seorang Mulya E. Siregar, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa keuangan (OJK) dalam menekuni rutinitas kerjanya yang begitu padat.

Prinsip tersebut juga ditularkan kepada timnya agar selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam bekerja. Dalam menekuni pekerjaannya dia memiliki pola pikir bahwa seorang pegawai harus mampu berpikir setingkat lebih tinggi dan siap bekerja setingkat lebih rendah dari jabatan/posisi yang dimiliki saat ini.

Menurut dia, jika seseorang mampu berpikir setingkat di atas jabatannya, maka bukan tidak mungkin suatu saat nanti orang tersebut dapat mengerjakan tugasnya dengan mudah ketika naik jabatan. Selain itu akan lebih mudah bagi saya memahami catatan atasan. Begitu pun sebaliknya. “Jika suatu saat nanti seseorang diharuskan mengambil alih tugas pejabat lain setingkat dibawahnya, maka dia harus mampu mengerjakannya agar pekerjaan itu tidak terhenti,” katanya.

Bagi *stakeholders* OJK, para pelaku usaha dan pengamat ekonomi, nama

Mulya E. Siregar sudah sangat populer terdengar. Apalagi saat diberi tanggung jawab menjabat di posisi yang kini dia tempati.

Sebelumnya, Mulya menjabat sebagai Asisten Gubernur di Bank Indonesia (BI) yang ditugaskan mengawasi perbankan di OJK pada 31 Desember 2013. Mulya secara resmi dipindahtugaskan sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan I pada 1 Januari 2014 ke OJK.

Begitu beralih ke OJK, pria ini ditugaskan membawahi tiga departemen, yaitu Departemen Perbankan Syariah, Departemen Penelitian Pengaturan Perbankan, dan Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

Menjadi seorang pemimpin dengan mengayomi dan membina anak buah adalah sebuah tanggung jawab besar bagi pria kelahiran Jakarta 14 Maret 1957 ini. “Jika ada kesalahan internal didalam tim, saya cenderung mencari akar masalah dan mencoba mencari solusi



daripada mencari siapa yang salah,” ungkapnya. Hal itulah yang membuat bawahannya merasa nyaman dan semangat dalam bekerja.

Sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan I OJK, Mulya bertugas menghasilkan regulasi dan penelitian yang terkait dengan perbankan nasional. Regulasi itu diterbitkan guna melahirkan perbankan yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional secara optimal. Menurut dia, meskipun sistem perbankan dinilai sangat sehat, tapi jika tidak berkontribusi terhadap perekonomian negara, maka tidak ada gunanya.

Saat ini ratio penyaluran kredit sekitar 30%-50%. Sementara di negara anggota ASEAN mencapai 80%, bahkan ratio penyaluran kredit perbankan terhadap PDB di Malaysia sudah di atas 100%. Maklum saja, sejak krisis moneter yang melanda Indonesia hingga banyak bank dilikuidasi pada 1998 membuat regulasi perbankan diatur seketat mungkin. “Karena itu, OJK kini tengah berupaya menerbitkan regulasi agar perbankan dapat berkontribusi secara optimal,” kata Mulya.

Selain regulasi, dia juga membawahi bidang penelitian. Mulya dan rekan-rekan sedang meneliti kedudukan bank asing meliputi definisi bank asing dan perlukah pengaturan yang berbeda bagi bank asing sebagaimana yang berlaku di negara lain.

“Dalam menyambut MEA [Masyarakat Ekonomi Asean], perbankan Indonesia harus bergerak agresif dalam menyalurkan kredit di sektor-sektor potensial,” tutur Mulya. Porsi penyaluran kredit yang digelontorkan oleh perbankan Indonesia, khususnya pertanian, pertambangan, transportasi, dan infrastruktur ternyata hanya dibawah 60% dari portofolio kredit. Sementara kira-kira 40% dari portofolio kredit disalurkan untuk kredit konsumsi.


Padahal empat sektor diatas memiliki *multiplier effect* yang besar dan menyerap tenaga kerja yang besar pula. “Untuk itu, ke

depan OJK akan mengatur bank asing agar dapat penyaluran kredit yang berdasarkan *expertise* berkontribusi terhadap perekonomian nasional dengan optimal melalui keunggulan bank asing dalam melakukan pembiayaan pada sektor tertentu, misalnya pertambangan dan pertanian,” jelasnya.

Guna menyukseskan MEA, Indonesia masuk ke dalam era *Asian Banking Integration Framework* (ABIF). Proses integrasi ini menghasilkan ABIF *Guidelines* bersama sepuluh negara ASEAN. ABIF yang memiliki semangat untuk menghadirkan perbankan masing-masing anggota di ASEAN. Tujuannya agar mendorong investasi dan perdagangan antarsesama negara anggota.

Tantangan yang kini tengah dirasakan Mulya adalah menyangkut soal negosiasi dengan regulator dari negara-negara ASEAN lainnya agar bank-bank dari Indonesia dapat beroperasi dengan kompetitif di 9 negara ASEAN lainnya. Hal ini dapat terjadi bila semua negara ASEAN mengacu pada ABIF *Guidelines* sehingga resiprokalitas dapat berlangsung dengan optimal.

Beserta timnya, dalam dua tahun kedepan, Mulya berencana untuk meningkatkan peran perbankan dalam *financial inclusion*. Sebagaimana diketahui, OJK telah menerbitkan regulasi tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka *financial inclusion* (Laku Pandai) yang merupakan *Branchless Banking*. Sebanyak enam bank telah melakukan implementasi ke berbagai daerah. Ditambah 3.720 agen individual dan 30 agen badan hukum turut serta berupaya menyukseskan program ini.

Mulya berharap Laku Pandai dapat menyebar sampai ke daerah-daerah di Tanah Air khususnya yang sulit dijangkau (*remote area*) sehingga diharapkan masyarakat dapat mengakses layanan perbankan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

**“...ke depan OJK akan mengatur bank asing agar dapat penyaluran kredit yang berdasarkan *expertise* berkontribusi terhadap perekonomian nasional dengan optimal melalui keunggulan bank asing dalam melakukan pembiayaan pada sektor tertentu, misalnya pertambangan dan pertanian.”**



# Memupuk Kebiasaan Menabung bagi Pelajar

Jika sebelumnya para pelajar harus menggunakan nama orang tua atau wali untuk memiliki produk simpanan, kini atas inisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mereka bisa membuka produk simpanan dengan namanya sendiri.





Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin (*kiri*) berbincang dengan Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad saat peluncuran Program Simpanan Pelajar (Simpel) di Jakarta, Selasa (8/9).

**D**ulu para pelajar di Indonesia tak mudah memiliki produk simpanan. Misalnya saja, anak di bawah umur 17 tahun harus menggunakan nama wali atau orang tua untuk membuka rekening di industri perbankan. Selain itu, bank pun umumnya mensyaratkan biaya minimal pembukaan rekening dan setoran minimal yang tak sedikit.

Namun, dengan inisiasi regulator industri keuangan tersebut para pelajar kini mendapat angin segar. Para calon nasabah cilik tersebut kini bisa memiliki produk simpanan atas nama sendiri. Bahkan kini biaya pembukaan rekening dan setoran minimal pun amat terjangkau.

Pada tanggal 8 September 2015, OJK melakukan *launching* produk tabungan berlabel Simpanan Pelajar (SimPel).

Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad, produk ini menjadi sarana pendidikan keuangan bagi pelajar. Sebab dengan membudayakan menabung sejak dini, seseorang bisa lebih disiplin dan bijak mengatur keuangannya.

Dalam lingkup luas, budaya menabung pun bisa bermanfaat bagi perekonomian suatu negara. Logikanya, kata Muliaman, semakin banyak uang yang ditabung masyarakat, maka semakin banyak pula *cuan* yang bisa digunakan untuk mendanai pembangunan di negara tersebut. "Sehingga kalau kita ingin mengutamakan pembangunan nasional, harus membudayakan menabung sejak dini," jelas Muliaman di Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Adapun produk tabungan bagi pelajar ini diluncurkan dalam dua bentuk yakni SimPel dan SimPel iB. Produk ini memang ditujukan untuk menggarap potensi besar dari kalangan pelajar. Sebab berdasarkan hasil riset OJK pada 2013, tingkat inklusi keuangan dari 50 juta siswa di Indonesia baru mencapai 44%.

Data tersebut berarti mayoritas siswa di Indonesia belum melek dan menggunakan jasa industri keuangan. Padahal, para pelajar ini merupakan calon-calon investor dan deposan besar bagi industri keuangan.

Untuk penyesuaian produk ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, meluncurkan produk dengan setoran awal pembukaan rekening baru minimal Rp5.000.

Produk yang menasar para pelajar dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) pun memberlakukan setoran minimal hanya Rp1.000.

Kalangan bankir sendiri mengklaim dalam jangka pendek tak mencari banyak likuiditas dari produk anyar tersebut melihat setoran yang terjangkau. "Tapi ini lebih mengejar pembelajaran anak untuk menabung," jelas Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Achmad Baiquni. Hingga akhir tahun nanti, BNI menargetkan akan meraih 100.000 rekening baru untuk produk SimPel.

Senior Executive Vice President PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Muhammad Ali pun mengakui dalam jangka pendek pihaknya tak berharap



**"...kalau kita ingin mengutamakan pembangunan nasional, harus membudayakan menabung sejak dini."**

banyak produk anyar ini mampu mengerek signifikan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Pada tahap awal ini, Ali menyebut pihaknya lebih berfokus menanamkan pentingnya menabung bagi para pelajar. Dia mengatakan hingga akhir tahun perseroan membidik 50.000 rekening baru dari 50 sekolah untuk produk baru ini.

Direktur Utama PT Bank BNI Syariah Dinno Indiano mengungkapkan produk tabungan ini akan menjadi sarana edukasi

Tabungan SimPel merupakan produk bank dengan fitur yang telah disesuaikan dengan kebutuhan para pelajar untuk mendorong budaya menabung sejak dini.







▲  
OJK bersama industri perbankan mengembangkan produk tabungan yang diberi nama Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) yang merupakan salah satu upaya OJK dalam membangkitkan kembali "budaya menabung" sejak dini bagi pelajar.

bersama untuk meningkatkan budaya menabung. Saat ini BNI Syariah telah menghimpun 3.000 rekening baru. "Akhir tahun akan tambah 183 sekolah dengan 7.000-8.000 rekening baru," kata Dinno.


Lain lagi dengan anak usaha Bank Mandiri. Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri Agus Sudiarto menuturkan pihaknya telah bekerja sama dengan 26 sekolah dan menggaet 1.100 rekening baru. "Nanti kami mau gaet 16 sekolah lagi dan 7.000 rekening baru," jelas Agus.

Sementara itu Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Suwignyo Budiman mengatakan hadirnya produk tabungan Simpanan Pelajar yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi tunas berkembangnya budaya menabung. "Dengan ini likuiditas bank akan lebih baik," ujar Suwignyo.

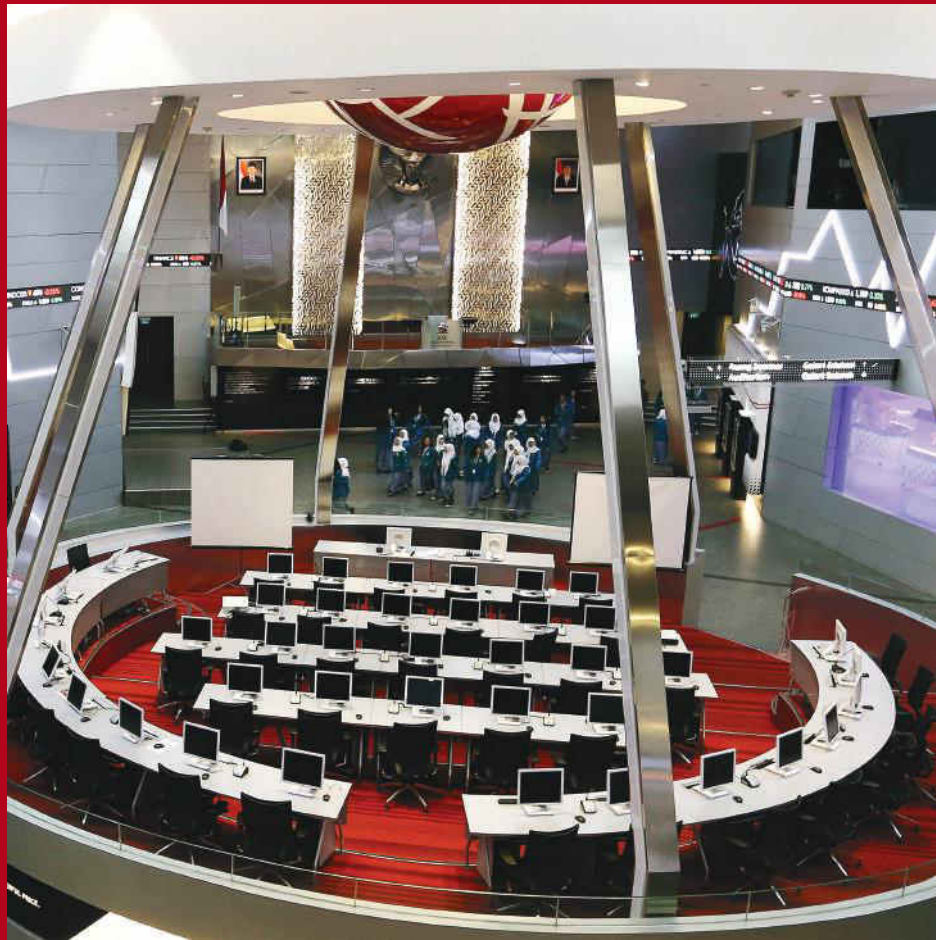
Suwignyo mengungkapkan BCA bakal mengembangkan produk tabungan ini dengan beberapa penambahan fitur. Di antaranya, yakni pemberian *reward* dan

kemudahan akses lewat jaringan elektronik *banking*. Hingga kini BCA disebutkan telah menggaet 10 sekolah untuk aktivasi produk tabungan baru tersebut. "Ke depannya kami akan garap berapapun potensi yang bisa digarap," kata Suwignyo.

Hingga kini, baru 14 bank yang meluncurkan produk SimPel. Rinciannya, delapan Bank Umum Konvensional, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, BTN, Bank Permata, Bank Jabar-Banten, dan Bank Jatim serta sebanyak enam Badan Usaha Syariah (BUS) pun turut ikut serta, yakni Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah, dan Panin Syariah.

OJK sendiri berharap, nantinya seluruh bank di Indonesia akan memiliki produk SimPel. Tujuannya agar semakin banyak variasi dan penetrasi dari produk anyar ini. Sekaligus, agar kalangan pelajar di pelosok negeri tak hanya sekedar mendengar kabar gembira, tapi juga memperoleh manfaat nyata dari kabar gembira tersebut. 

# Pasar Modal Indonesia Dulu dan Kini



Sejak pemerintah Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 10 Agustus 1977, peran pasar modal terhadap perekonomian Indonesia kian besar. Diawali dengan transaksi manual, kini pasar modal Indonesia yang berusia 38 tahun telah bertransformasi menuju pasar yang dinamis. Perubahan apa saja yang telah dilakukan?

**K**epala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan sudah banyak kemajuan yang dicapai pasar modal Indonesia selama 38 tahun ini. Mulai dari lonjakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kapitalisasi pasar modal, jumlah dan nilai emisi obligasi, dan nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana.

Bahkan sistem perdagangan dan teknologi informasi yang digunakan juga kian canggih. Ditambah sejumlah aturan yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal Indonesia. Namun, untuk mencapai titik saat ini tidaklah mudah. Perkembangan pasar modal Indonesia juga mengalami pasang surut.

Sebagai informasi, pada saat

diaktifkannya kembali pasar modal pada 1977 oleh Presiden Soeharto, perdagangan saham masih dilakukan secara manual. Adapun dari tahun 1979-1987 kondisi pasar modal mengalami *bearish*. IHSG selalu berada di bawah 100, kecuali tahun 1983 sempat menyentuh angka 104,53. Lima tahun kemudian, tepatnya 20 Desember tahun 1988 posisi IHSG lari di posisi tertinggi 442,204.

Bisa dikatakan titik balik pasar modal Indonesia terjadi pada 1992. Saat itu, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) diprivatisasi. Wajah baru BEI berubah total baik dalam perdagangan maupun infrastruktur lantai bursa. Perilaku pasar juga membaik karena tidak lagi emosional.

Setelah melewati masa krisis, BEI mencatat rekor IHSG tertinggi baru



pada awal 2006 setelah mencapai level 1.500 karena adanya sentimen positif dari dilantiknya presiden baru, Susilo Bambang Yudhoyono. Lonjakan yang dimulai tahun 2004 itu sekaligus membuat BEJ menjadi salah satu bursa saham dengan kinerja terbaik di Asia pada tahun tersebut.

Tahun 2007 BEJ melakukan merger dengan Bursa Efek Surabaya berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Penggabungan ini menjadikan Indonesia hanya memiliki satu bursa saham hingga sekarang.

Lantas, perubahan apa saja yang dilakukan selama 38 tahun masa transisi pasar modal Indonesia?

Dimulai dari sistem teknologi informasi, BEI melakukan terobosan dengan mengaplikasikan *Jakarta Automated Trading System (JATS)* sejak 1995. Sistem ini mampu berintegrasi dengan sistem pengawasan perdagangan secara otomatis, sehingga mampu meningkatkan likuiditas saham.

Melalui JATS lantai BEI memiliki papan elektronik yang memberikan informasi mutakhir tentang harga saham, volume perdagangan serta posisi IHSG. Selain itu, kehadiran JATS mengharuskan lantai bursa pindah ke Gedung Bursa Efek Jakarta di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Sudirman, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, JATS dikembangkan ke *JATS Remote Access* atau *Remote Trading*. Belakangan ini berkembang teknologi *Online Trading*, sehingga anggota bursa bisa bertransaksi di kantor masing-masing dan investor dapat bertransaksi di rumah atau di mana saja asalkan *online* dengan laptop atau PC, bahkan telepon genggam.

Selain itu, BEI telah merealisasikan dana pengembangan TI sebesar 60%

hingga September 2011 dari dana yang telah dianggarkan sebesar Rp115 miliar pada 2011. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan sistem TI bursa.

Saat ini, ada sejumlah program pengembangan infrastruktur pasar modal yang sedang berjalan, yakni *C-BEST Next Generation*, *AKSes Financial Hub*, dan Jaringan Pengelolaan Investasi Terpadu.

Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia, Margeret Tang menjelaskan perlunya komitmen dan dukungan pelaku pasar terhadap rencana yang telah ditetapkan agar pengembangan infrastruktur dapat terealisasi sesuai dengan jadwal.

"Kami menyadari bahwa harapan pelaku pasar serta OJK agar pelaksanaan pengembangan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan *deadline* yang telah ditetapkan. Tidak hanya terlaksana, kami tentunya juga akan memperhatikan prosesnya sehingga infrastruktur yang kami siapkan ini kualitasnya baik dan sesuai kebutuhan para pelaku," katanya.

Proyek pengembangan *C-BEST Next Generation* akan dilakukan *testing* sistem pada November 2015, sehingga sistem ini dapat digunakan pada awal 2016.

Adapun pada 2014 KSEI telah melakukan terobosan penting melalui program *Co-Branding* Fasilitas AKSes sebagai upaya pendalaman pasar dengan melakukan sinergi dengan perbankan yang diharapkan mampu membuka peluang akses masyarakat yang lebih mudah untuk dapat berinvestasi di pasar modal. Kerja sama tersebut dilakukan melalui pemanfaatan jaringan perbankan untuk pemantauan portofolio efek yang tercatat di KSEI.

Sementara itu, beberapa waktu

lalu KSEI juga berhasil menerapkan penyelesaian dana atas transaksi di pasar modal menggunakan sistem BI-RTGS. Dan dalam waktu dekat, KSEI akan memperbaharui kerja sama dengan Bank Pembayaran dan Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN).

Segala program sistem tersebut dibuat untuk meningkatkan jumlah investor serta mempermudah investor melakukan transaksi di pasar saham. BEI merekam hanya 25% dari 400.000 pemegang *single investor identification (SID)* di Tanah Air yang aktif bertransaksi di pasar modal.

Selebihnya sama sekali tidak melakukan aktivitas beli-jual meskipun nasabah tetap memiliki dana dalam akun. Aktif dalam hal ini merujuk pada transaksi yang dilakukan investor, sekalipun hanya sekali dalam setahun.

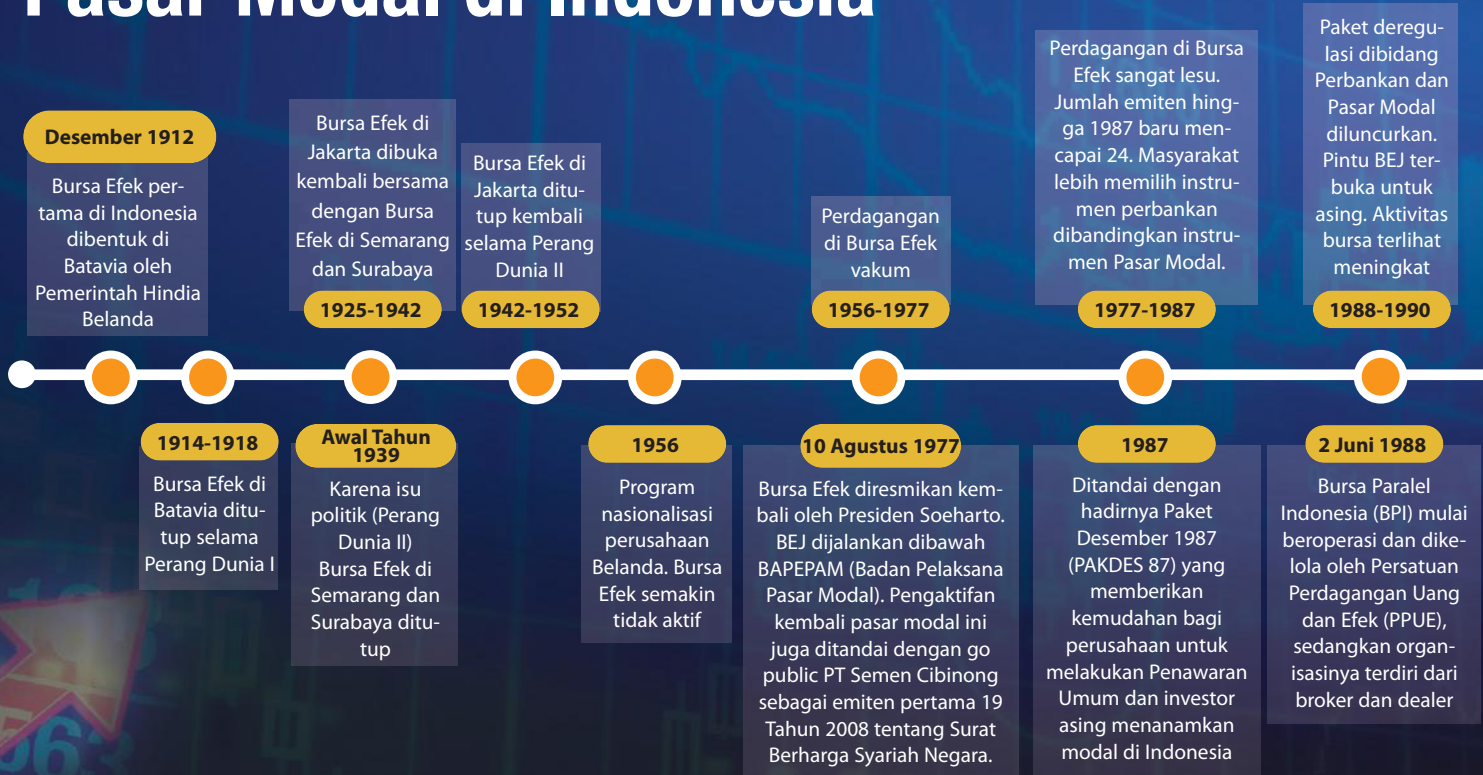
Peningkatan jumlah investor menjadi salah satu program utama di pasar modal Indonesia. Direktur Pengembangan BEI, Nicky Hogan mengatakan BEI menargetkan penambahan 100.000 investor aktif per tahun di tengah rendahnya transaksi yang dilakukan pemilik rekening efek.

"Dengan penambahan investor aktif, diharapkan target transaksi Rp15 triliun per hari dalam tiga tahun ke depan dapat tercapai. Saat ini, nilai perdagangan per hari hanya Rp6 triliun," jelas Nicky.

### **IHSG Penuh Tantangan**

Bagaimana perkembangan IHSG? Pada 1992 posisi IHSG masih berkisar di angka 274,3. Namun per 4 September 2015, IHSG sudah di posisi 4.415. Bila dibandingkan dengan 1992 memang terjadi peningkatan yang cukup besar. Namun demikian, posisi tersebut sudah turun cukup dalam hingga 15,53%

# Tonggak Perkembangan Pasar Modal di Indonesia



**“Kebijakan global yang sulit diprediksi akan menciptakan variabel makro yang tidak kondusif terhadap korporasi. Pasar juga diperkirakan akan semakin bergejolak.”**

sepanjang tahun ini.

Pasar saham memang mengalami sejumlah hambatan tahun ini. Bahkan, sejumlah sekuritas juga sudah merevisi target mereka dari sebelumnya yang cukup fantastik dari sekitar 5.500-6.200.

*Senior Analyst* PT KDB Daewoo Securities Indonesia, Maxi Liesyaputra memprediksi IHSG hingga akhir tahun ada di kisaran 3.588-3.974. Prediksi tersebut cukup jauh dibandingkan dengan prediksi perusahaan pada awal tahun. KDB Daewoo sempat menargetkan IHSG ada di posisi 5.878 pada akhir 2015.

Alasan yang membuat perusahaan mengoreksi targetnya hingga cukup

dalam adalah perekonomian global dan Indonesia yang cukup melemah dan berkurangnya tingkat aliran dana yang masuk ke pasar saham Indonesia. Berkurangnya aliran dana tersebut terutama akibat dari devaluasi mata uang yang dilakukan China.

“Kebijakan global yang sulit diprediksi akan menciptakan variabel makro yang tidak kondusif terhadap korporasi. Pasar juga diperkirakan akan semakin bergejolak,” kata Maxi.

Maxi menilai IHSG diprediksi masih akan melemah seiring masih besarnya potensi dana asing yang keluar. Meski tidak bisa memprediksi sampai titik mana





penurunan tersebut, dia meminta investor terus waspada.

Maxi menjelaskan pasar saham sampai 2011 digerakkan oleh pemulihan fundamental korporasi yang ditunjukkan oleh tren ROE yang meningkat. Namun, tren ROE balikan sejak 2011 yang menunjukkan bahwa gerak pasar saham Indonesia lebih disebabkan oleh aspek kelebihan likuiditas dari program *quantitative easing* bank sentral Amerika Serikat.

Selain itu, dia menilai kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal III masih tidak akan jauh berbeda dengan kuartal II. Hal ini menyebabkan kinerja korporasi juga tidak akan jauh berbeda.

“Masih akan *slow down* menurut kami. Kenaikan *fed fund rate* juga akan memberikan pengaruh nanti.”

Dalam menghadapi gejolak bursa saham ini OJK sudah mengeluarkan sejumlah stimulus dan kebijakan untuk meningkatkan kembali kinerja pasar modal. Salah satunya, dengan menerbitkan surat edaran terkait pembelian kembali (*buyback*) saham tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS).

Sebanyak 17 emiten telah menyatakan diri untuk membeli kembali (*buyback*) sahamnya di publik senilai total Rp12,26 triliun sepanjang tahun berjalan ini.

Kondisi pasar saham juga mempengaruhi kinerja proses penawaran umum di pasar modal. Dari sisi jumlah emiten pasar modal Indonesia memang sudah kedatangan banyak emiten baru. Bila pada 1987 jumlah emiten hanya ada 24 dan bertambah menjadi 153 emiten pada 1992, saat ini sudah berjumlah 518 emiten. Bukan jumlah yang sedikit tentunya. Adapun BEI menargetkan ada tambahan sekitar 32 emiten tahun ini. Sampai saat akhir Agustus 2015, baru terealisasi sekitar 12 emiten.

Direktur Penilaian BEI, Samsul Hidayat mengatakan enam perusahaan bersiap IPO saham pada sisa semester

Il tahun ini. Mereka adalah PT Mahaka Radio Integra, PT Victoria Insurance, PT Internux, PT Vallianz Offshore Indonesia, PT Mitra Komunikasi Nusantara, dan PT Duta Lestari Sentratama (Kino Indonesia). Bila rencana terealisasi, keenamnya akan melengkapi 12 perusahaan yang baru *listing* sepanjang tahun berjalan ini.

Bisa dikatakan enam perusahaan cukup percaya diri masuk ke pasar modal di tengah kondisi pasar saham yang saat ini sedang bergejolak.

Dari sisi kapitalisasi pasar juga seperti itu. Pada 1992 total nilai kapitalisasi pasar BEJ cuma Rp24,8 triliun setahun. Namun per 4 September 2015, total nilai kapitalisasinya menyentuh Rp4.555 triliun.

Industri reksa dana juga kena imbas. Kinerja reksa dana saham pada Agustus yang terkoreksi cukup dalam hingga -6,75% menyeret kinerja reksa dana saham sepanjang tahun berjalan hingga -17,56%. Namun demikian, sejak 2010 hingga saat ini, NAB dan unit penyertaan reksa dana terus tumbuh. Bila pada 2010 hanya ada 616 produk reksa dana dengan NAB Rp144,69 triliun dan unit penyertaan 82,07 miliar unit, per Juli 2015 sudah mencapai 997 produk dengan NAB Rp261,52 triliun dan 171,62 miliar unit penyertaan.

### Cukup atraktif

Berbeda dengan pasar saham, pasar obligasi dinilai masih cukup atraktif. Total emisi obligasi dan sukuk korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) di sepanjang tahun ini berjumlah 36 emisi dengan nilai emisi Rp47,07 triliun.

Dari sisi nilai emisi, jumlah total emisi obligasi dan sukuk korporasi tersebut telah melampaui pencapaian di sepanjang 2014 dengan total nilai emisi



Rp46,84 triliun dari hasil penerbitan 49 obligasi dan sukuk.

Dengan demikian, total nilai emisi obligasi dan sukuk sampai dengan saat ini berjumlah 271 emisi dengan nilai nominal *outstanding* sebesar Rp246,66 triliun dan US\$100 juta, diterbitkan oleh 104 Emiten. Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 96 seri dengan nilai nominal Rp1.367,8 triliun dan 5 EBA senilai Rp2,71 triliun.

Pada sisi lain, OJK juga telah menjadikan tahun ini sebagai pasar modal syariah guna mendorong kontribusi industri ini yang hingga kini masih minim. Lantas, apa saja usaha OJK untuk bisa mewujudkannya?


Guna mempercepat pertumbuhan industri pasar modal syariah, OJK menyusun sejumlah kebijakan yang merupakan langkah strategis yang diharapkan bisa mendorong percepatan pertumbuhan industri ini.

Beberapa waktu lalu OJK sudah meluncurkan *roadmap* pasar modal syariah 2015-2019. Arah *roadmap* tersebut antara lain penguatan pengaturan atas

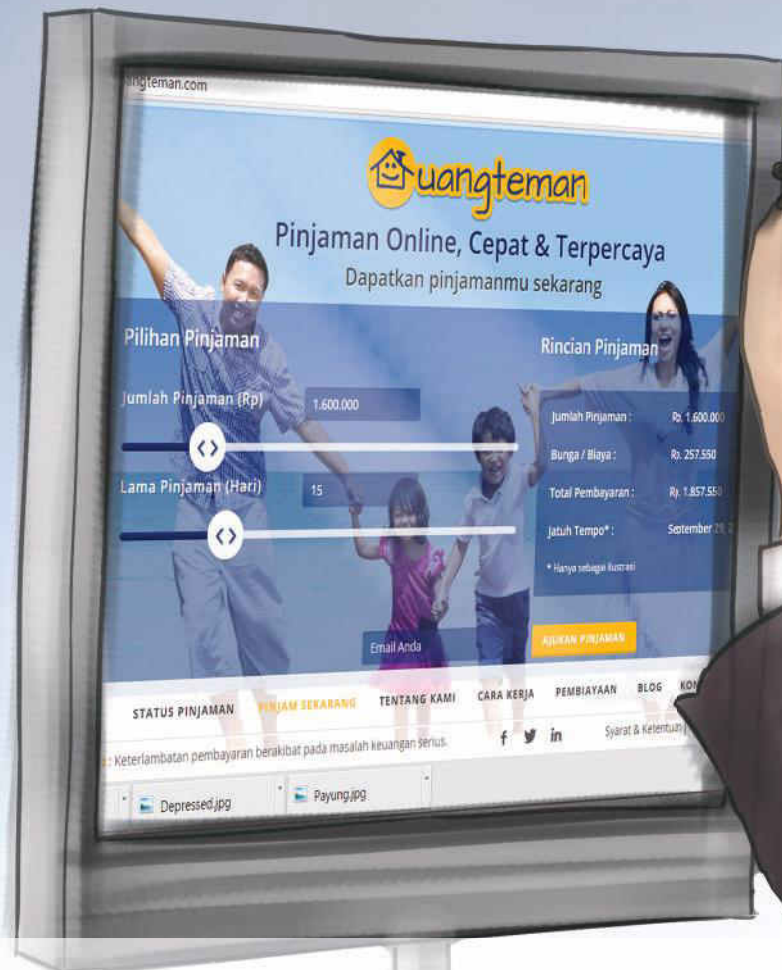
produk, lembaga dan profesi terkait pasar modal syariah, peningkatan suplai dan *demand* produk pasar modal syariah, dan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi pasar modal syariah.

Selain itu ada promosi dan edukasi pasar modal syariah. Kemudian, koordinasi dengan pemerintah dan regulator terkait penciptaan sinergi kebijakan pengembangan pasar modal syariah.

Dibalik adanya berbagai hambatan saat ini, pasar modal Indonesia masih menyimpan harapan dan potensi yang sangat besar, khususnya dalam mendorong perekonomian. OJK terus mendorong perusahaan baik itu swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berinvestasi dan mencari sumber pendanaan melalui pasar modal.

Sinergi antara OJK, BEI, KSEI, KPEI, sejumlah asosiasi terkait, investor, dan pelaku pasar modal lainnya tentunya sangat diperlukan untuk membangun pasar modal Indonesia agar lebih baik ke depannya. Kita tunggu, kejutan dan perubahan apa yang diberikan pasar modal Indonesia di tahun ke-39 nantinya! 





# Tergiur Jasa Peminjaman Online

Terdesak biaya berobat istri, Vikri Ramadhan, akhirnya mengajukan pinjaman ke situs *online* penyedia kredit tanpa agunan berbunga tinggi, *Uangteman.com*.

“Kalau dari iklan *kan* janjinya proses cepat, ternyata enggak dapat,” katanya di Jakarta belum lama ini.

**M**enurutnya, masyarakat kecil sering kali tidak menemukan solusi kala membutuhkan dana darurat seperti saat anggota keluarga sakit dan membutuhkan perawatan. Apalagi penghasilannya habis setiap bulan tanpa menyisakan tabungan. Lembaga keuangan seperti Pegadaian, walau dapat menyediakan dana dengan cepat, tapi meminta adanya agunan. “Sedangkan di *Uangteman.com* asalkan karyawan tetap, bisa pinjam tanpa jaminan,” ujarnya.

*Uangteman.com* merupakan perusahaan Fintech yang bergerak dalam jasa peminjaman uang dalam tempo 30 hari dengan nominal hingga Rp2 juta serta bunga progresif 1% per hari. Ada empat syarat yang harus dipenuhi jika ingin meminjam melalui *Uangteman.com*, yakni tinggal dan memiliki KTP Jakarta, sudah berumur 21 tahun, memiliki penghasilan setidaknya Rp3,5 juta, dan memiliki rekening bank atas nama pribadi.

Pinjaman *online* tersebut menawarkan jumlah pinjaman minimal sebesar Rp1,5 juta

dan pinjaman maksimal sebesar Rp2 juta. Sementara untuk lama peminjaman, minimal lama peminjaman adalah 10 hari dan maksimal adalah 30 hari.

Untuk melakukan pinjaman, konsumen cukup mengisi sederet formulir yang disediakan di *uangteman.com*. Setelah itu, pihak *Uangteman.com* akan melakukan evaluasi menggunakan sistem algoritma *credit scoring and fraud*. Lalu, mereka akan melakukan verifikasi data. Sama seperti lembaga peminjaman lainnya. *Uangteman.com* juga akan melakukan verifikasi melalui telepon atau kunjungan rumah.

Manajemen perusahaan tersebut memastikan bahwa data yang diberikan oleh calon peminjam akan disimpan dalam database *Uangteman.com* dan data itu aman, karena perusahaan ini mengakui memiliki teknologi khusus untuk memastikan data yang tersimpan akan tetap aman.

Saat ini *Uangteman.com* baru beroperasi di wilayah Jabodetabek, meski manajemen






perusahaan itu menyebutkan mereka memiliki rencana untuk melakukan ekspansi ke Jawa Tengah. Bahkan, kini visi perusahaan jasa peminjaman online ini mempromosikan *financial inclusion*.

Dengan visi tersebut, perusahaan ini ingin mempermudah akses bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan dana bagi keperluan pribadi ataupun pengembangan usaha mereka. *Financial Inclusion* menjadi tren di dunia paska krisis 2008, yang bertujuan mempermudah akses finansial bagi masyarakat kecil dan berpendapatan rendah.

Aidil Zulkifli, CEO *Uangteman.com*, mengatakan besaran bunga tidak terlalu diperhatikan oleh nasabahnya. Hal itu dibuktikan dengan tingginya pertumbuhan nasabah yang mengajukan aplikasi ke perusahaannya. "Setiap pekan kami tumbuh dua digit," jelas Aidil ketika ditemui di JW Marriott, Jakarta.

Namun, CEO asal Malaysia ini menolak menyebutkan jumlah nasabah maupun total pinjaman yang telah diberikan. Aidil menyebutkan perusahaannya berada di luar regulasi yang ada, sehingga tidak tunduk pada aturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Kementerian Keuangan RI. 




**Kusumaningtuti S. Soetiono, Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen**

**OJK**, meminta masyarakat berhati-hati terhadap berbagai penawaran *online*, baik dalam bentuk pinjaman maupun investasi.

Menurutnya, dalam dua tahun terakhir OJK mengawasi 328 kegiatan investasi ilegal. Perusahaan investasi ilegal tersebut tersebar di Jakarta, Surabaya, Batam, Denpasar, Kupang, Flores, serta Jayapura.

Dia mengatakan sejumlah perusahaan tersebut belum ditindak karena tidak adanya laporan nasabah yang merasa dirugikan. Menurutnya, terdapat celah dalam hukum Indonesia yang mengharuskan adanya laporan kerugian sebelum sebuah perusahaan ditindak.

Lebih lanjut, Kusumaningtuti mengatakan, perusahaan tersebut biasanya menjanjikan imbal hasil yang menggiurkan serta proses yang cepat. Namun, otoritas menengarai banyak di antara perusahaan tersebut dalam kategori bodong alias tanpa aktivitas usaha yang jelas.

Kusumaningtuti mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap peminjaman uang secara *online* dengan bunga tinggi. Syarat pinjaman dari kreditor walau mudah, tetapi usaha ini layaknya rentenir di pasar. "Kami mengharapkan agar masyarakat lebih baik pinjam ke PT Pegadaian (Persero) dan lembaga pembiayaan lain. Sebab, selain mudah, keberadaan Pegadaian sah atau diawasi OJK," ungkapnya. 



**Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank**


**OJK**, menuturkan otoritas berupaya membenahi regulasi Pegadaian untuk mengakomodasi pinjaman dengan nominal kecil, tapi tetap dilakukan

perusahaan resmi yang diawasi OJK.

Menurutnya, OJK akan mengupayakan aturan ini rampung pada akhir 2015 atau paling lambat awal 2016.

Dengan aturan ini, kata Firdaus, otoritas dapat menertibkan lembaga pemberi pinjaman dengan bunga tinggi serta perusahaan gadai liar yang banyak menjamur di kota besar.

Firdaus meyakini, dengan beleid ini masyarakat akan lebih mudah meminjam uang ke PT Pegadaian (Persero). Apalagi, kata Firdaus, jaringan Pegadaian telah hadir di sebagian besar kecamatan di Indonesia.

"Aturan ini juga memberi wewenang kepada Pegadaian untuk membina pegadaian swasta, melakukan sertifikasi ahli gadai, sehingga akan muncul standardisasi," katanya. 



*Ijtima* Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai prinsip syariah, membuat Otoritas Jasa Keuangan berinisiatif mempertemukan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi agar sistem Jaminan Kesehatan Nasional itu tidak ditinggal pesertanya.

## Kepesertaan BPJS Kesehatan Mengakomodasi Skema Syariah

Pada awal Agustus 2015, bertempat di Menara Merdeka Jakarta Pusat, pertemuan antara BPJS Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia, Pemerintah, Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan digelar. Dalam diskusi itu akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa dalam rekomendasi para ulama tersebut tidak ada satu frasa kata yang mengatakan BPJS Kesehatan sebagai produk haram.

Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menuturkan pihak yang hadir dalam pertemuan itu juga sepakat untuk membahas lebih lanjut skema yang

lebih baik. Tim akan melakukan pembahasan untuk mencari titik temu agar mekanisme kepesertaan berbasis syariah dapat terakomodasi.

"Masih terus dilakukan pembahasan. Mungkin nanti ada kolom dalam formulir kepesertaan untuk yang mau berbasis syariah," kata Firdaus.

Lebih lanjut dia menuturkan, masyarakat diminta tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan karena para pemangku kepentingan akan memfasilitasi agar layanan berbasis syariah tersedia. Namun, Firdaus memastikan tidak akan dibentuk unit BPJS Kesehatan baru untuk

melaksanakan layanan berskema syariah ini.

"BPJS uangnya berputar terus. Membayar klaim, itu juga minus. Jadi tidak berinvestasi yang berpotensi menghasilkan riba," katanya.

Fachmi Idris, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menuturkan penyelesaian rekomendasi ini akan dituntaskan sesegera mungkin. Menurutnya, jika memungkinkan, perubahan prinsip kepesertaan ini tuntas dengan peraturan direksi yang disetujui dewan pengawas, sehingga perubahan dapat diberlakukan secepatnya. Namun, jika hasil kajian tim membutuhkan perubahan aturan di level yang lebih tinggi, maka badan akan tunduk pada regulasi yang berlaku.



## “BPJS uangnya berputar terus. Membayar klaim, itu juga minus. Jadi tidak berinvestasi yang berpotensi menghasilkan riba.”

Menurut Fachmi, rekomendasi MUI yakni pembenahan tiga titik agar dalam penyelenggaraan BPJS terhindar dari sifat spekulatif (*gharar*), ketidakjelasan akad (*maisir*), dan riba.

Jaih Mubarak, Anggota Dewan Syariah Nasional MUI menuturkan rekomendasi yang dikeluarkan lembaganya mengikat secara moralitas. Tugas menindaklanjuti menjadi wewenang pihak terkait. Menurutnya, setelah unsur tidak sesuai syariah di BPJS diperbaiki, maka umat menjadi lebih tenang.

Mohamad Hidayat, Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI, menuturkan sistem keuangan Indonesia telah menganut dua aliran, yakni konvensional dan syariah. Sistem ini telah dipraktikkan hampir di semua lini keuangan mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal hingga surat utang.

“BPJS harusnya juga menganut dua sistem ini, sehingga umat dapat memilih, untuk itu ulama memberikan rekomendasi perbaikan” katanya.

Dia mengharapkan pemerintah segera menyediakan layanan kesehatan berbasis syariah ini, sehingga umat dapat mengikuti kepesertaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional itu dengan keyakinan yang mantap. Menurutnya, jika tiga unsur yang


ditemukan dalam BPJS telah hilang, fatwa tidak sesuai syariah bagi badan akan disesuaikan.

Irfan Humaidi, Juru Bicara BPJS Kesehatan, mengatakan kesepakatan yang dihasilkan sejak awal Agustus 2015 dengan pemangku kepentingan termasuk dengan MUI, masih terus dibahas dalam kelompok kerja. Berbagai opsi sedang disiapkan agar rekomendasi itu dapat dipenuhi.

“Prinsipnya BPJS Kesehatan ingin dapat segera memenuhi rekomendasi tersebut,” katanya.

Dia mengatakan, saat ini pertemuan lintas instansi itu terus digelar secara rutin. Namun, kata Irfan, membahas sebuah peraturan membutuhkan berbagai pertimbangan. Apalagi diharapkan hasil kelompok kerja ini juga disahkan oleh para pemuka agama dan ditetapkan sebagai produk yang telah memenuhi prinsip syariah.

“Opsi pembahasannya seperti apakah dengan perbaikan formulir pendaftaran cukup, juga termasuk pertimbangan lainnya,” kata Irfan.

Irfan tidak dapat memastikan kapan kepesertaan berbasis syariah ini dapat diakomodasi karena masih dilakukan pembahasan oleh tim. Namun, dia memastikan BPJS Kesehatan akan mengakomodasi basis kepesertaan sesuai syariah. 



Hasil Pertemuan antara BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN dan OJK Sehubungan dengan Putusan dan Rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia.

Hal-hal yang telah di sepakati antara para pihak tersebut di atas untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat:

01

Telah dicapai kesepakatan para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK.

02

Rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, Tidak ada kosan kata 'haram'.

03

Masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan selanjutnya perlu adanya penyempurnaan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program yang sesuai dengan syariah.

# Relaksasi *Loan to Value*

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia selain kebutuhan sandang dan papan. Kebutuhan akan perumahan tidak akan pernah habis seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hingga sekarang permintaan masyarakat akan perumahan masih begitu tinggi. Hal ini menyebabkan harga perumahan, terutama di kota-kota besar mengalami peningkatan.

**D**i tengah kondisi tersebut, munculah para spekulan yang mencari untung dengan membeli rumah bukan untuk dihuni, melainkan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Tentu, ulah para spekulan ini menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan rumah pertama mereka dengan harga yang terjangkau.

Melihat hal ini, Bank Indonesia pada 2012 menetapkan rasio pinjaman terhadap nilai aset (*loan to value/LTV*) sebesar 70% bagi masyarakat yang ingin membeli rumah tapak tipe di atas 70 meter persegi. Ini berarti, para debitur harus memiliki *down payment* atau uang muka sebesar 30% dari harga rumah.

Aturan tersebut kembali diperketat pada September 2013 ketika BI menerapkan aturan berjenjang LTV. Nasabah yang ingin mengajukan fasilitas KPR kedua diharuskan membayar uang

muka 40% atau LTV yang disalurkan bank mencapai 60% dan untuk rumah ketiga dan seterusnya LTV sebesar 50%. Untuk tipe bangunan antara 22 m<sup>2</sup> hingga 70 m<sup>2</sup> ditetapkan LTV untuk pembiayaan rumah kedua sebesar 70% dan rumah ketiga dan seterusnya sebesar 60%.

Sementara itu, untuk perbankan syariah, pembiayaan KPR dengan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT) dan *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) untuk KPR tipe 70m<sup>2</sup> ke atas sebesar 80% untuk rumah pertama, 70% untuk rumah kedua dan rumah ketiga dan seterusnya sebesar 60%. Sedangkan untuk rumah tipe 22 m<sup>2</sup> hingga tipe 70 m<sup>2</sup> rumah kedua sebesar 80% dan rumah ketiga seterusnya sebesar 70%.

Data statistik perbankan menunjukkan pengetatan ini berhasil mengerem laju pertumbuhan KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA). Pada 2011 pertumbuhan KPR mencapai 23,4%. Pertumbuhan ini naik menjadi 31,7%

pada 2012. Namun, sejak pemberlakuan LTV, pertumbuhan kredit mulai melambat, tercermin dari pertumbuhan sepanjang 2013 dan 2014 yang masing-masing mencapai 26,6% dan 12,5%.

Pada medio April 2015, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliawan D. Hadad pernah menuturkan pengetatan kebijakan KPR telah mencapai tujuannya, yakni mengerem laju pertumbuhan KPR yang sebelumnya terlalu kencang, selain mengurangi spekulan.

Oleh karena itu, pihaknya bersama dengan BI merancang langkah untuk kembali melonggarkan aturan LTV dengan tujuan permintaan KPR kembali normal dan membantu pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di tengah kelesuan ekonomi global maupun domestik. Seperti diketahui, sejak awal tahun kredit perbankan mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan ekonomi nasional.



Dari data uang beredar (M2) yang dipublikasikan BI, hingga Juli 2015 kredit perbankan Tanah Air tumbuh 9,4% secara tahunan senilai Rp3.859,6 triliun atau melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 10,5% secara tahunan.

### Rasio Kredit Bermasalah

BI pun menerbitkan pelonggaran ketentuan LTV untuk KPR dan KKB yang tertuang dalam PBI Nomor 17/10/PBI/2015 yang mulai berlaku 18 Juni 2015. Direktur Departemen Kebijakan Makropudensial BI Yati Kurniati mengatakan Bank Sentral memilih untuk melonggarkan ketentuan di sektor perumahan dan kendaraan bermotor ini dengan alasan melihat keterkaitan dua sektor tersebut dengan berbagai industri lainnya.

“Untuk sektor properti misalnya, ketika permintaan meningkat, permintaan alat-alat bangunan, material, serta barang-barang pengisi rumah seperti furnitur dan elektronik akan naik. Kami melihat itu, sehingga menjadi alasan kami melonggarkan aturan LTV ini,” jelasnya.

Pada aturan yang baru besaran uang muka diturunkan 10% untuk perbankan konvensional dan 5% untuk perbankan syariah dari besaran LTV yang tertuang pada peraturan LTV sebelumnya. Begitu pula untuk uang muka kredit kendaraan bermotor juga diturunkan sebesar 5% baik untuk bank konvensional maupun bank syariah dari 25% menjadi 20%.

Dalam pelonggaran aturan LTV, BI menyertakan syarat hanya bank-bank yang memiliki rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) *gross* di bawah 5% yang bisa mendapatkan relaksasi aturan ini. Tujuannya supaya perbankan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan perumahan.

Sesuai dengan BI, Deputy Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan OJK Mulya E. Siregar mengatakan sektor perumahan memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan roda perekonomian karena bisa menciptakan lapangan kerja.

“Kalau negara sedang resesi, sektor perumahan dilonggarkan karena akan menghasilkan efek domino. Industri lain ikut terangkat, seperti semen, ubin, pasir, dan genteng. Mereka butuh pembiayaan, jadi efeknya berantai,” ujarnya.

Sementara itu, dari pelaku industri perbankan menilai aturan relaksasi ini belum begitu terasa dampaknya dalam mendorong pertumbuhan kredit. Direktur Bisnis PT BNI Syariah Imam Teguh Saptono mengatakan hingga kini belum ada dampak signifikan dari aturan LTV ini. Menurutnya, ini disebabkan relaksasi LTV dikeluarkan pada pertengahan tahun dan di tengah kelesuan permintaan pasar akan perumahan.

Senada, Direktur Consumer Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hery Gunardi menuturkan dampak relaksasi aturan LTV tidak bisa langsung terasa, melainkan butuh waktu sekitar tiga bulan hingga empat bulan dari waktu diterbitkan. “Ketentuan kan dikeluarkan Juni, jadi dampaknya belum besar. *Impact* akhir tahun baru kelihatannya,” kata Hery.


Direktur Consumer Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Anggoro Eko Cahyo mengatakan momentum keluarnya aturan pelonggaran LTV yang terjadi di masa Lebaran membuat dampak



d a r i relaksasi tersebut tak begitu terasa. Sebab, masyarakat lebih fokus mempersiapkan perayaan hari raya dibanding mencari unit rumah.

Usai Lebaran, Anggoro memprediksi KPR bakal naik bertahap mengingat kondisi ekonomi yang masih mencatatkan perlambatan. “Dan masih ada ketentuan inden, sehingga akan sulit juga. Jadi, kami harapkan inden bisa direlaksasi juga.”

BI sendiri memperkirakan penambahan penyaluran kredit perumahan hingga akhir tahun ini tidak akan tumbuh lebih dari 1% setelah pelonggaran ini diterbitkan. “Saat ini *demand* kan lagi turun, dampak pertumbuhan KPR di bawah 1% atau sekitar Rp4,5 triliun selama sisa 6 bulan. Untuk KKB lebih kecil, sekitar Rp2 triliun,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara.

Adapun untuk proyeksi tahun depan, BI belum mampu memperkirakan penambahan kredit setelah aturan ini terbit. Menurut Tirta, proyeksi dampak aturan ini terhadap pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional. 



## **MOU OJK dan IDB**

# **Mendorong Lembaga Mikro Makin Berjaya**

Untuk meningkatkan kualitas sektor keuangan beserta pengawasannya, diperlukan menggelar kerja sama dengan berbagai pihak. Hal itu disadari oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga menjalin beberapa kesepakatan dengan pihak asing sepanjang Agustus 2015.



**“Indonesia sebagai sebuah laboratorium ekonomi mikro, sudah selangkahnya menjadi etalase pengembangan ekonomi mikro di dunia.”**



Kali ini, giliran OJK merangkul Islamic Development Bank (IDB) dan menuangkan kesepakatan yang ditandatangani di Jeddah, Arab Saudi, Selasa 4 Agustus 2015. Kesepakatan itu diteken oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muli Aman D. Hadad dan Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali.

Seusai penandatanganan kesepakatan itu, Muli Aman mengatakan kedua belah pihak sepakat untuk mendirikan pusat pengembangan lembaga keuangan mikro dan inklusi keuangan. Kesepakatan itu juga mencakup pembentukan pusat riset, pusat data, bantuan teknis, program pengembangan komunitas, pusat pelatihan, dan program pengembangan kapasitas.

Dia menuturkan kehadiran lembaga itu tentu saja akan mempertegas komitmen OJK dalam memberdayakan lembaga keuangan mikro dan perekonomian masyarakat kecil, yang justru berperan besar dalam perekonomian Indonesia saat ini. “Jelas, Indonesia sebagai sebuah laboratorium ekonomi mikro, sudah selangkahnya menjadi etalase pengembangan ekonomi mikro di dunia,” kata Muli Aman.

Menurut dia, pesatnya perkembangan lembaga keuangan mikro harus didukung oleh kehadiran satu pusat pengembangan atau *center of excellence* yang berfungsi tidak saja sebagai pusat kajian dan pemberian dukungan teknis melainkan juga sebagai wadah koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan lembaga ini. Pusat pengembangan ini, lanjutnya, terbuka bagi universitas, dan lembaga pemerintahan di negara lain atau institusi keuangan luar negeri yang memiliki perhatian atau kepentingan dengan keuangan mikro yang berbiaya murah.

“Visi lembaga ini adalah menjadi pusat pengembangan keuangan mikro dan inklusi keuangan bertaraf internasional guna mendukung pengentasan kemiskinan global,” jelasnya. Muli Aman menambahkan, selain mendapat dukungan IDB, pendirian pusat pengembangan keuangan mikro dan inklusi keuangan juga didukung lembaga multilateral lainnya seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, International Finance Corporation (IFC), dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Selain kesepakatan di bidang pusat pengembangan mikro itu, IDB akan memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan pengembangan lembaga keuangan syariah mulai dari perbankan syariah, pasar modal syariah dan

**“IDB akan melakukan investasi melalui lembaga keuangan yang ditunjuk, yakni PNM [Permodalan Nasional Madani]. Lembaga ini akan melakukan investasi langsung kepada *baitul mal watamwil* sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia yang terpilih.”**

industri keuangan non bank syariah. IDB juga akan mendukung program OJK untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil.

Khusus untuk pengembangan keuangan mikro dan inklusi keuangan, IDB sepakat meningkatkan peranannya dalam memberikan pinjaman lunak kepada lembaga keuangan mikro syariah, dan pengembangan ekonomi mikro di Indonesia.

Menurut Direktur Direktorat Internasional OJK Triyono, dengan adanya nota kesepahaman itu maka akan memberikan “jalan tol” kepada pengawas

perbankan syariah, pasar modal syariah maupun asuransi syariah untuk bekerja sama dengan bank Islam tersebut. Kesepahaman ini tidak hanya untuk pembentukan keuangan mikro saja, tapi juga sebagai fasilitas kepada lembaga *non microfinance* agar dapat bergabung dengan IDB.

Untuk tahap awal, IDB akan menyalurkan dana sebesar US\$10 juta untuk mengembangkan *microfinancing* di Indonesia. Dengan masuknya aliran dana



**Triyono**

Direktur Direktorat Internasional OJK

IDB ke Indonesia tentu saja menjadi kabar baik bagi pengusaha mikro. Pasalnya, suku bunga pinjaman berbasis syariah ini akan digelontorkan dengan bunga yang murah ketimbang bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lain.

"IDB akan melakukan investasi melalui lembaga keuangan yang ditunjuk, yakni PNM [Permodalan Nasional Madani]. Lembaga ini akan melakukan investasi langsung kepada *baitul mal watamwil* sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia yang terpilih," paparnya. IDB juga berkerja sama dengan OJK untuk pengembangan sumber daya manusianya.

Triyono menjelaskan OJK maupun IDB secara bersama memiliki kepentingan dalam merumuskan kerja sama ini. OJK dapat memanfaatkan sektor pembiayaan mikro berbasis syariah agar dapat mendorong kebijakan dan pengembangan riset, memperoleh kualitas lembaga keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat. "Begitu juga dengan IDB. Dengan adanya para profesional yang bekerja di keuangan mikro, secara otomatis investasi IDB akan lebih aman, *profitable* dan *sustainable*," tukasnya.


Sebagai langkah awal, OJK *international center for microfinance* akan dibangun secara bertahap mulai dari riset dan pengembangan kapasitas. Riset yang dimaksud terkait dengan kepentingan OJK yang dirancang untuk memberikan rekomendasi terhadap suatu kebijakan. OJK bakal memfasilitasi beberapa akademisi dan praktisi yang ingin melakukan riset terhadap pembiayaan mikro, serta memberikan biaya murah dan bahkan gratis terhadap peserta pendidikan di pusat kajian pembiayaan itu.

Sementara dalam kesempatan kunjungan ke IDB, Muliaman mendapat kehormatan untuk memberikan ceramah umum di Lembaga Pelatihan dan Riset Islam. Lembaga ini berada di bawah IDB dan dipimpin seorang direktur jenderal. Adapun Menteri Keuangan Bambang S. Brodjonegoro, pernah menjadi Dirjen lembaga ini.

Dalam ceramahnya, Muliaman menyinggung masalah UMKM saat ini. Menurutnya, di saat krisis seperti saat ini, sektor ini selalu menjadi primadona. "Fokus di UMKM. Karena luas dan banyak menyerap tenaga kerja," katanya.

Menurut dia, sejak krisis 2008 paradigma ekonomi mengalami perubahan. Hal ini terlihat pada perundingan Komite Basel maupun di G-20, yaitu menekankan sektor ini. Muliaman mengungkapkan bahwa krisis ekonomi yang melanda dunia juga berpengaruh terhadap Indonesia.

Pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,71%, sedangkan kuartal yang sama tahun lalu adalah 5,01%. Walau demikian, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik. "Lembaga-lembaga keuangan solid dan berkinerja baik," katanya.

Pemerintah sejauh ini melakukan reformasi struktural, fokus pada sektor prioritas, dan menggenjot pembangunan infrastruktur. Sedangkan OJK memfokuskan diri pada upaya akselerasi pertumbuhan domestik maupun stabilitas ekonomi dalam negeri. Pada sektor keuangan ini, di Indonesia ada tiga pilar, yaitu OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. 



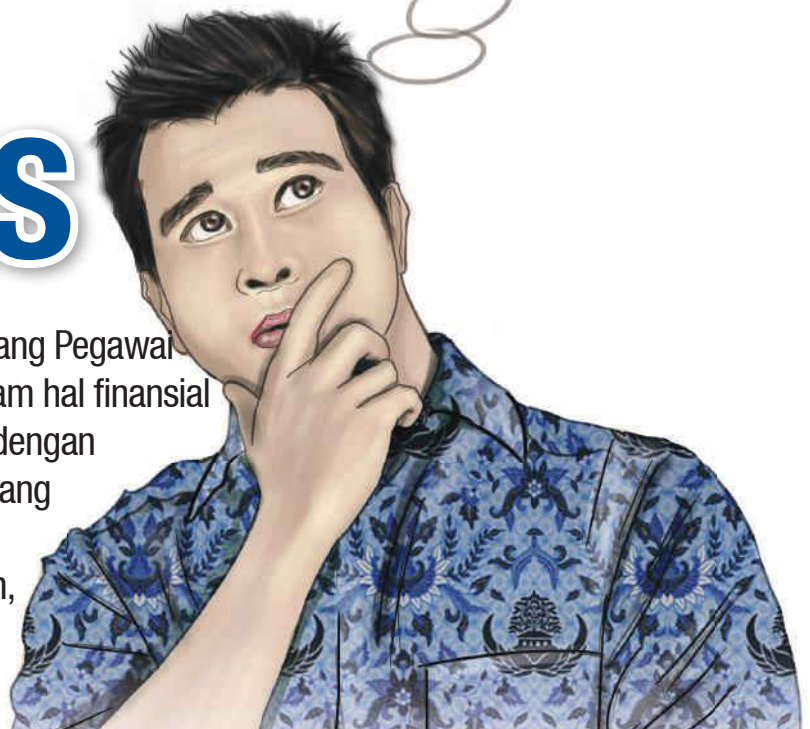
**"Fokus di UMKM. Karena luas dan banyak menyerap tenaga kerja."**





# Investasi untuk PNS

Sebagian orang menganggap menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tergolong lebih aman dalam hal finansial dibandingkan dengan pegawai swasta. Ya, dengan berbagai jaminan dari pemerintah, profesi yang satu ini menarik minat banyak orang untuk mencobanya. Apalagi seiring waktu berjalan, profesi PNS semakin menjanjikan karena penghasilannya terbilang tinggi.



**P**adahal dahulu sempat terdapat stigma PNS memiliki gaji kecil. Saat ini PNS level tertentu berpotensi mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada pegawai swasta.

Sayangnya, kerap kali ada pemberitaan negatif tentang korupsi di kalangan PNS. Padahal, seperti halnya orang-orang dengan profesi lainnya, seorang PNS pun bisa mengembangkan penghasilannya lewat investasi. Investasi tentu saja dapat mengantarkan seseorang menuju kesejahteraan.

Jadi tanpa harus menggerogoti uang yang bukan haknya, PNS mampu meningkatkan kondisi finansialnya lebih baik

lagi. Tinggal bagaimana PNS menggunakan dana yang ada untuk berinvestasi. "PNS dapat kaya dengan berinvestasi, jangan korupsi," kata Chairman Oneshildt Financial Planning Risza Bambang.

Bagi PNS yang berniat melakukan investasi, sebaiknya mulai mengubah pola pikir dan menjaga pengeluaran. PNS harus menanamkan keyakinan bahwa mereka juga dapat menjadi kaya. Jika seseorang sudah berpikir tidak akan bisa berinvestasi, maka dengan sendirinya tingkah lakunya juga mengikuti. Ketika ada peluang untuk berinvestasi, dia akan berpikir tidak ada dana, padahal belum tentu. Lihat saja dalam kehidupan sehari-hari, uang yang dikeluarkan untuk rokok

dan jajan ternyata cukup tinggi. Jika ada PNS yang merasa gajinya tergolong kecil, mereka dapat berpikir bagaimana caranya menekan pengeluaran.

Para pegawai negeri yang berniat investasi dapat mencoba untuk mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti menyisihkan jatah makan di luar bersama keluarga dan membawa bekal makanan ke kantor. Mengurangi kebiasaan merokok atau jajan dan makan di luar dapat menghemat pengeluaran Rp500.000-Rp1 juta per bulan.

PNS sebetulnya mudah untuk mengerem pengeluarannya jika dibandingkan dengan pegawai swasta. Hal ini dikarenakan PNS mendapatkan banyak fasilitas, seperti rumah, kendaraan jemputan untuk pulang pergi kerja, dan fasilitas kesehatan. Dengan berbagai fasilitas semacam itu, seharusnya pos-pos pengeluaran tertentu dapat ditekan atau bahkan dihilangkan.

Coba bandingkan dengan pegawai swasta yang tidak mendapatkan fasilitas serupa, otomatis jenis pos pengeluarannya lebih banyak ketimbang PNS.

### Dana darurat

Setelah berhasil mengubah pola pikir dan menjaga pengeluaran, PNS pada tahap bisa berinvestasi di awal sebesar 10% dari pemasukan. Misalnya gaji diterima pada tanggal 30 setiap bulan sebesar Rp10 juta. PNS tadi dapat menyisihkan pada hari itu juga sebesar Rp1 juta untuk berinvestasi.

Idealnya selain investasi, PNS perlu menyiapkan dana darurat terlebih dahulu. Besaran dana darurat yang harus dikumpulkan PNS sebesar tiga hingga enam kali pengeluaran bulanan.

Namun untuk berinvestasi tak perlu harus menunggu hingga seluruh dana darurat terkumpul. Ambil dana untuk investasi dari pemasukan bulanan, sedangkan untuk mengumpulkan dana darurat dapat menggunakan sebagian dari gaji ketiga belas.

Mengingat PNS adalah pelayan masyarakat, sudah selayaknya PNS mendedikasikan waktu lebih banyak untuk masyarakat. Sehingga jika ingin berinvestasi, PNS harus memilih jenis investasi yang sesuai dengan pola kerjanya.

“Jam kerja yang panjang membuat waktu untuk mengurus diri sendiri terbatas. Jadi pilihlah instrumen investasi yang tidak membuat pusing,” katanya.

Instrumen investasi yang dapat dipilih di antaranya reksa dana karena ada manajer investasi yang membantu memutar uang untuk mendapatkan hasil. Pemilihan jenis


## “Jam kerja yang panjang membuat waktu untuk mengurus diri sendiri terbatas. Jadi pilihlah instrumen investasi yang tidak membuat pusing,”

reksa dana juga perlu disesuaikan dengan profil risiko masing-masing orang. Misalnya seseorang yang masih berusia muda dan termasuk tipe investor yang agresif dapat mengambil instrumen investasi dalam bentuk reksa dana yang berisiko tinggi serta berpotensi mencetak hasil tinggi (*high risk high return*) pula yaitu reksadana saham. Sementara itu, orang yang agresif tapi umurnya lebih tua sebaiknya memilih reksa dana pasar uang dan pendapatan tetap.

PNS juga dapat berinvestasi pada obligasi dan deposito. PNS lebih cocok memilih ketiga instrumen investasi tersebut daripada membeli saham. Sebab investor saham harus mempunyai waktu dan pengetahuan khusus untuk mengamati situasi.

Risza juga berpendapat investasi di sektor riil kurang cocok untuk PNS karena rumit dan harus meluangkan waktu lebih banyak, contohnya membuka warung yang membutuhkan banyak tenaga. Dia juga tak menyarankan PNS berbisnis properti karena sektor ini membutuhkan perhatian khusus, misalnya dengan mengeluarkan modal membangun rumah lalu menjualnya.

Namun, PNS yang memiliki dana berlebih dan dapat menyisihkan untuk uang muka properti bisa membeli rumah dengan kredit pemilikan rumah (KPR) agar tidak rumit. Lewat KPR, seseorang seperti dipaksa untuk menabung. Jika sudah ada tempat tinggal, rumah yang dibeli lewat KPR tersebut tak harus ditinggali. Rumah dapat disewakan untuk menambah pemasukan atau sebagai bekal masa pensiun. Jadi meskipun PNS akan mendapatkan uang pensiun, tak ada salahnya mempersiapkan tambahan bekal pensiun sendiri. Rumah yang dibeli dengan KPR tadi akan terus meningkat nilainya dan dapat dijadikan tabungan pada masa pensiun.

Alternatif lainnya, PNS juga dapat memilih *unit link* yang merupakan asuransi berbalut investasi. Apapun pilihan investasinya, yang jelas PNS juga memiliki kesempatan mengecap manisnya hasil investasi. 

# Sinergi Kelembagaan, Jadi Benteng Praktik Investasi Ilegal

Tidak mudah memberantas investasi ilegal mengingat banyak celah yang dapat ditembus para pelaku kriminal itu, termasuk soal kemiskinan, kepentingan, kebutuhan hingga mitos. Sosialisasi kepada publik mengenai cara–cara investasi yang benar menjadi salah satu kunci untuk menekan munculnya kembali praktek investasi bodong ini.

**S**ikap konsumtif masyarakat Indonesia menjadi salah satu pemicu maraknya penawaran investasi ilegal. Apalagi kondisinya, jumlah kelas menengah di negara ini yang mencapai 60% lebih menyukai menggunakan uangnya untuk konsumsi daripada menabung.

Demikian dikatakan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kusumaningtuti S. Soetiono saat memberi pengantar dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Investasi Ilegal “Terobosan Dalam Upaya Mencegah dan Mengatasi Investasi Ilegal” di Surabaya, Senin (3/8/2015).

Budaya konsumsi tersebut, lanjut dia, akan memunculkan budaya spekulasi. Kondisi tersebut masih ditambah dengan kenyataan bahwa baru 21,8% masyarakat yang melek keuangan.

Ini berarti dari 100 orang Indonesia, hanya 21 orang yang paham masalah keuangan beserta manfaatnya. “Jadi, ketidaktahuan itulah yang dimanfaatkan oleh investasi keuangan,” katanya

Oleh sebab itu agar terhindar dari praktik investasi ilegal, masyarakat perlu meneliti karakter investasi yang ditawarkan. Seperti menjanjikan keuntungan besar yang tidak wajar, atau penawaran yang dilakukan secara *online*, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik.

Dalam UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan) dan mulai tahun 2014 juga mengawasi sektor

perbankan (bank umum dan bank perkreditan rakyat).

Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukanlah LJK, sehingga perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan demikian OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut.

Untuk menekan munculnya investasi ilegal, OJK memiliki dua strategi, yaitu preventif dengan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal. Selain itu, ada *knowledge sharing* dengan penegak hukum dan regulator di daerah.

Strategi lainnya adalah represif, yakni melakukan upaya koordinatif antarinstansi untuk mempercepat penanganan melalui kerangka kerja sama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi. Kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan ke OJK akan dikoordinasikan



dengan Satgas Waspada Investasi untuk penanganannya.

### Pemahaman Keuangan

Dalam FGD tersebut Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Paripurna P. Suganda menyatakan penyelenggara investasi melakukan metode gali lubang tutup lubang. "Hal itu dikarenakan *return* yang diterima klien sebenarnya berasal dari uang klien sendiri," ujarnya.

Yang perlu dilakukan menurut dia, adalah perluas pengertian menghimpun dana dari masyarakat, tidak hanya dalam bentuk simpanan tapi juga dalam bentuk investasi. "Sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat juga diperlukan agar berpikir rasional dalam berinvestasi," ungkapnya. Dia menambahkan hal lain yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan koordinasi dengan penegak hukum tentang skema investasi ilegal.

Sementara itu Kepala Prodi S2 Sosiologi FISIP Universitas Airlangga Surabaya Mustain Mashud dalam paparan berjudul "*Kondisi Masyarakat vs Tingginya Minat Masyarakat Terhadap*

## "Sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat diperlukan agar berpikir rasional dalam berinvestasi."

*Investasi Ilegal Suatu Tinjauan Sosiologis*" menilai kondisi transisional masyarakat demikian memengaruhi cara pemaknaan terhadap investasi ilegal.

Menurut Mustain, masyarakat selalu tidak kapok dengan kejadian berulang pada investasi ilegal karena kultur kemiskinan, kepentingan dan kebutuhan, sikap irasional, mitos, loyalitas terhadap *reference group*, serta terjebak secara struktural. "Untuk itu diperlukan sosialisasi yang jelas tidak saja ke masyarakat, tapi [dan utamanya] ke para pengelola institusi-institusi sosial-keagamaan, khususnya ke para pemuka dan tokoh-tokohnya," ungkapnya.

### Kerap terjebak

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan

Konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetiono mengatakan literasi keuangan di Indonesia yang masih rendah mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih investasi yang ditawarkan.

"Ketidaktahuan masyarakat itu juga berhubungan dengan keterbatasan jasa [lembaga keuangan] seperti belum adanya cabang bank di pelosok daerah. Jadi, ketika ada penawaran investasi, apalagi tawaran imbal hasilnya besar, masyarakat kerap terjebak dalam investasi yang biasa disebut bodong tersebut," ujarnya.

Literasi keuangan Indonesia secara nasional masih rendah yaitu sebesar 21,8%. Angka melek produk finansial ini lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang tingkat melek investasinya sudah mencapai 40% sampai 60%.

Oleh karena itu, perempuan yang akrab disapa Titu itu menuturkan bahwa masyarakat harus lebih cermat dalam memilih investasi. Imbal hasil besar belum tentu menguntungkan karena ada pepatah *high risk, high return*.

"Jadi lihat lagi sebesar apa imbal hasilnya. Kalau ternyata besar dan bisa mencapai dua atau tiga kali lipat dari imbal hasil deposito di bank, maka investasi itu perlu dicurigai dan lebih baik jangan masuk ke dalamnya," tuturnya.

Selain itu masyarakat juga harus lebih memahami investasi apa saja yang berada di bawah pengawasan regulator. Pasalnya, jasa investasi tidak hanya ditawarkan oleh sektor jasa keuangan, tetapi juga berasal dari sektor





perdagangan berjangka dan komoditi maupun koperasi, meski bentuk jasa investasinya kerap membingungkan masyarakat.

Direktur Pelayanan Konsumen Bidang Edukasi dan Pelayanan Konsumen OJK, Sondang Martha Samosir menjelaskan masyarakat harus memahami dulu bahwa produk investasi yang berada di bawah OJK adalah produk investasi dari sektor jasa keuangan seperti perbankan, perusahaan efek, manajer investasi, asuransi, dan usaha pegadaian.

“Bila sudah memahami jenis investasi yang berada di bawah pengawasan OJK, masyarakat harus memastikan setiap

perdagangan berjangka dan komoditi maupun koperasi, meski bentuk jasa investasinya kerap membingungkan masyarakat.

Direktur Pelayanan Konsumen Bidang Edukasi dan Pelayanan Konsumen OJK, Sondang Martha Samosir menjelaskan masyarakat harus memahami dulu bahwa produk investasi yang berada di bawah OJK adalah produk investasi dari sektor jasa keuangan seperti perbankan, perusahaan efek, manajer investasi, asuransi, dan usaha pegadaian.

“Bila sudah memahami jenis investasi yang berada di bawah pengawasan OJK, masyarakat harus memastikan setiap

menyebutkan bahwa perusahaan terdaftar dan berada dalam pengawasan OJK.

a d a

penawaran

produk investasi,

apakah berada di bawah

pengawasan OJK atau tidak.

Caranya masyarakat bisa mengecek perusahaan investasi itu di situs resmi OJK [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) atau dengan menghubungi Layanan Konsumen OJK di 1500 655,” ujarnya.


Pasalnya, ada pula perusahaan jasa investasi yang berada di sektor keuangan, tetapi belum terdaftar di OJK. Bila perusahaan investasi itu berada di bawah pengawasan OJK seharusnya sudah memberi tahu sejak awal kepada calon nasabahnya. Selain itu, masyarakat juga bisa langsung memastikan kepada perusahaan terkait apakah berada di bawah pengawasan OJK atau tidak.

Dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pasal 20 tertulis Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib

Tahapan berikutnya, masyarakat juga harus memahami secara detail tentang risiko dalam investasi. Alasannya, meskipun sudah masuk investasi yang berada di bawah pengawasan OJK, tetapi masyarakat masih berpotensi merugi dalam jumlah besar atau kecil. Jadi, membaca peluang risiko juga harus dicermati.

“Layanan Konsumen OJK juga bisa digunakan masyarakat untuk mencari informasi jelas terkait berbagai jenis investasi,” ujar Sondang.

Upaya edukasi ke konsumen di berbagai daerah di Indonesia yang dilakukan oleh OJK tidak akan meningkatkan literasi keuangan nasional, bila masyarakat tidak berperan aktif dalam memahami berbagai produk jasa keuangan tersebut.

Bersikap hati-hati, teliti dan tidak mudah tergiur imbal hasil besar menjadi dasar utama agar masyarakat tidak lagi tertipu investasi bodong atau yang di luar pengawasan OJK. 

# Layanan Konsumen OJK 1500 655

## Pelayanan Konsumen Lebih Efektif, Cepat, dan Responsif


Sistem Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi (*integrated financial care*) yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 21 Januari 2013 sampai dengan 2014 dimaksudkan untuk memudahkan konsumen mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduan yang disampaikan ke lembaga ini. Bahkan, dengan konsep *trackable* dan *traceable* yang dipergunakan, dapat memudahkan konsumen mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduannya.

Sejak pertama kali diluncurkan, Sistem Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi telah tiga kali bertransformasi. Layanan Konsumen tahap awal diluncurkan dengan dukungan lima tenaga *caller* yang dilanjutkan dengan Layanan Konsumen tahap menengah yang diluncurkan pada 17 Mei 2013.

Seiring dengan masuknya pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK dan keberadaan kantor OJK di daerah, Sistem Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi OJK kembali mengalami

metamorfosis di tahap akhir dengan mengusung konsep *trackable* dan *traceable*.

Secara keseluruhan, sejak 2014 hingga 4 September 2015 tercatat sektor perbankan paling banyak pengaduan di 10 kota besar di Indonesia, yakni sekitar 793 pengaduan, disusul pengaduan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di angka 346. Untuk pengaduan konsumen tentang pasar modal dalam periode tersebut terdapat sebanyak 65 pengaduan, sedangkan sektor Non Lembaga Jasa Keuangan (LJK) ada 12 pengaduan.

Sementara itu, pengaduan konsumen paling banyak dari Kota Administrasi Jakarta Selatan, yakni ada 183 pengaduan, dengan sektor Perbankan yang paling banyak mendapat pengaduan, disusul sektor IKNB, dan Pasar Modal. Konsumen di Kota Administrasi Jakarta Timur terbanyak kedua memberikan pengaduan kepada OJK. 

**10 Kota/Kabupaten Terbanyak Pengaduan**  
(Januari 2014 - 4 September 2015)

Kota/Kabupaten	IKNB	Non LJK	Pasar Modal	Perbankan	Total Pengaduan
Kota Administrasi Jakarta Selatan	66	3	9	105	183
Lainnya	39	3	11	120	173
Kota Administrasi Jakarta Timur	42	-	8	120	170
Kota Medan	37	2	18	70	127
Kota Administrasi Jakarta Pusat	37	2	10	66	115
Kota Surabaya	28	-	2	75	105
Kota Bogor	6	1	-	95	102
Kota Administrasi Jakarta Barat	18	-	7	59	84
Kota Banjarmasin	54	-	-	29	83
Kota Makassar	19	1	-	54	74

**IKNB**  
**346**  
.....  
Non LJK  
**12**



**Pasar Modal**  
**65**  
.....  
Perbankan  
**793**

**Jumlah Pengaduan Per Sektor**

Sumber : OJK



## Asuransi Bagi Pekerja Formal

# Cukupkah Hanya BPJS?

Implementasi jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang dilakukan Pemerintah Indonesia membuat banyak orang bertanya-tanya, “masih perlukah membeli polis asuransi lain?”

Sejatinya, seluruh pekerja wajib mengikutsertakan dirinya dalam program jaminan kesehatan dan jaminan pensiun yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan saat ini.

Dalam kepesertaan itu pekerja harus membayar iuran setiap bulan. Porsi iuran yang harus dibayarkan pekerja biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan pemberi kerja (perusahaan). Namun, tetap saja pekerja harus menyisihkan pendapatan untuk membayar proteksi yang bersifat wajib itu.

Meski demikian tak semua orang yakin dengan perlindungan yang diberikan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu. Akibatnya, sebagian peserta terus mencari layanan lainnya yang dapat menjadi pelengkap.

Freddy Pielor, praktisi keuangan dan asuransi, mengatakan pekerja formal masih membutuhkan tambahan proteksi

lain guna menutupi kebutuhan yang tidak bisa di cover kedua jaminan sosial itu.

Misalnya, perusahaan mendaftarkan karyawannya di kelas III. Di kategori ini, layanan kamar yang diterima pekerja apabila sakit harus beramai-ramai dengan pasien lainnya.

Terlebih jika pekerja merupakan karyawan yang membutuhkan layanan praktis tanpa harus memulainya dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama seperti klinik atau Puskesmas.

Bahkan, bila perusahaan mendaftarkan karyawan di kelas I, masih ada pertimbangan lain untuk membeli polis asuransi lain. Pasalnya, seluruh peserta BPJS harus menanggung kekurangan apabila terjadi kelebihan klaim (*excess claim*) dari yang ditetapkan.

“Jadi harus tahu limitnya dan kondisi kesehatan saat ini. Tetap sesuai kebutuhan untuk membeli tambahan asuransi lain

yang bisa meng-cover apabila kelebihan klaim,” kata Freddy.

Dia menyarankan kebutuhan jiwa atau bersifat kesehatan menjadi produk pertama yang mesti dilirik pekerja formal karena bersifat primer. Dengan begitu, kebutuhan kesehatan yang dirasa mahal bisa aman terpenuhi dari asuransi komersial.

Selain itu produk asuransi kecelakaan diri bisa menjadi pilihan berikutnya dengan mempertimbangkan limit yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Apabila pekerja telah mendapatkan proteksi primernya, Freddy menyarankan peserta untuk mencoba mengasuransikan harta bendanya guna mengantisipasi adanya bencana.

Produk asuransi lain yang tergolong penting yakni rumah dan kendaraan. Jika pendapatan Anda masih tersisa



setelah mendahulukan asuransi jiwa atau kesehatan, maka tak ada salahnya membeli polis jenis asuransi ini.

Apalagi, bila terjadi bencana alam yang tidak diinginkan seperti banjir atau kebakaran. Dengan membeli polis asuransi, setidaknya Anda bisa bernapas lega karena akan mendapatkan biaya pertanggung-janaan yang setimpal dengan yang selama ini Anda iurkan.

Freddy juga menyarankan pekerja yang gemar *travelling* juga sedikit merogoh kocek untuk membayar premi asuransi perjalanan.

"Itu sangat cocok untuk pekerja yang suka bepergian sehingga proteksi akan lebih maksimal," ujarnya.

### Full Cover atau Investasi?

Menurut Freddy, pekerja harus membedakan kebutuhan proteksi dan investasi agar implikasinya maksimal kepada pekerja yang bersangkutan.

Asuransi jiwa menawarkan produk proteksi berbasis investasi yang dikenal dengan nama *unit-linked*. Namun, Freddy mengatakan pemisahan produk akan jauh lebih mendapatkan manfaat yang maksimal daripada harus memilih produk *unit-linked*.

"Jadi untuk pekerja, lebih baik pisahkan asuransi jiwa yang sifatnya tradisional. Jika ingin berinvestasi akan lebih dapat hasilnya dengan langsung ke manajer investasi untuk mengambil

reksa dana misalnya," ujarnya.

Menurutnya, pengembangan dana di perusahaan asuransi lebih minimal dan berisiko tinggi apabila dibandingkan dengan langsung menyerahkan kepada manajer investasi.

Adapun, jika berinvestasi langsung melalui reksa dana atau saham, pekerja dapat fokus untuk terus menggandakan investasinya dengan sejumlah aksi, seperti membeli lebih banyak atau menarik dalam jumlah tertentu.

Meski demikian, Freddy mengingatkan pembelian polis asuransi tambahan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan pekerja itu sendiri. OJK



## Beberapa Pelayanan yang Tidak Dijamin BPJS Kesehatan

- 1 Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
- 2 Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat.
- 3 Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja.
- 4 Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
- 5 Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau estetik.
- 6 Pelayanan untuk mengatasi infertilitas (memperoleh keturunan).
- 7 Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi).
- 8 Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol.
- 9 Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.
- 10 Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment/HTA*).
- 11 Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen).
- 12 Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu.
- 13 Perbekalan kesehatan rumah tangga.
- 14 Pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15 Pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa/wabah.
- 16 Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah.



# Go-Jek:

**Dari Mengantar Penumpang Hingga Belanja Barang**

Bermula dari ojek sepeda pada 1970-an di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat itu ada larangan penggunaan bemo atau becak memasuki kawasan pelabuhan, sehingga muncullah ide dari mereka yang memiliki sepeda untuk menawarkan jasa.



Seperi dikutip dalam laman *historia.id*, kemudian ojek sepeda berkembang, sebarannya hingga kawasan Ancol, Kota, dan Harmoni. Saat itu, pilihan ojek sepeda adalah untuk menempuh jarak yang dekat dalam waktu cepat. Ternyata, di kala sebagian warga Jakarta menggunakan ojek sepeda, penduduk desa di Jawa Tengah telah berinovasi mengganti sepeda dengan motor untuk mengojek.

Kala itu motor yang dipakai adalah buatan Jepang bermesin 90cc. Perkembangan ini pun menulari para petani di Jawa Timur yang kemudian menjadi tukang ojek. Bersamaan dengan perkembangan produk motor serta banyaknya kebutuhan transportasi di tengah kemacetan jalan, ojek motor pun kian menjamur.

Bahkan, saat ini ojek motor tidak hanya membawa penumpang ke tujuannya, melainkan sudah berkembang dari mengantar orang, menjadi mengirim barang dan makanan serta berbelanja. Go-Jek, menjadi salah satu perusahaan yang menghubungkan masyarakat dengan para pengojek yang terorganisir memberikan pelayanan lengkap.

Nadiem Makarim, CEO PT Go-Jek Indonesia, menjelaskan pengojek yang terorganisir sejak 2011 diperkirakan lebih dari 15.000 armada, tersebar di Jabodetabek, Bali, Surabaya, dan Bandung. "Semula saya memiliki 20 moto. Saya tidak memiliki data detail armada Go-Jek, tapi kurang lebih 15.000 sepeda motor."

Dari semula terbiasa naik ojek kemana-mana, Nadiem mendapat inspirasi untuk mencoba merangkul para pengojek dalam satu wadah yang diberi nama Go-Jek. Apalagi ojek itu multifungsi,



CEO PT Go-Jek Indonesia Nadiem Makarim

efisien dan dapat menghindari macet, serta menghemat waktu. "Untuk mengembangkan perusahaan Go-Jek, saya butuh tim yang hebat, berjiwa nasionalis dan berjiwa sosial. Jadi bukan hanya mencari duit saja," ungkapnya.

### Jarang keluhan


Nadiem yakin Go-Jek akan mampu bersaing, karena pelayanannya selama ini jarang mendapat keluhan dari konsumen. "Dari sisi teknologi, kami lebih unggul dari pesaing."

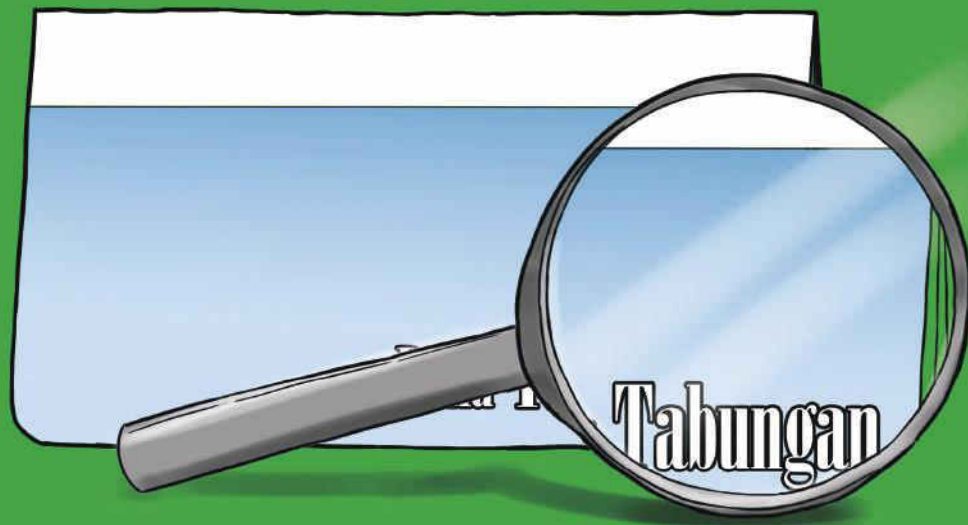
Dia mengakui ada pesaing yang menawarkan harga promo di bawah harga yang ditawarkan Go-Jek. Namun, dia optimistis perkembangan Go-Jek semakin maju, apalagi ada investor dari dalam dan luar negeri yang siap mengucurkan dananya untuk perkembangan perusahaan.

Pelayanan Go-Jek yang tersedia dalam aplikasi iOS dan Android melalui [www.go-jek.com/app/](http://www.go-jek.com/app/) memiliki keunggulan yaitu memproses pesanan lebih cepat, memiliki *live track driver*, dan fasilitas membayar dengan Go-Jek Credit. Dalam metode kredit ini, pembayaran Go-Jek dibuat *cashless* dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan.

Informasi *website* perusahaan itu menyebutkan jika konsumen memiliki Go-Jek Credit, sistem di perusahaan itu akan mendebit kredit untuk membayar layanan yang digunakan. Untuk memeriksa jumlah kreditnya, pengguna cukup mengklik *My Wallet* di aplikasi Go-Jek. Apabila tidak memiliki cukup kredit untuk membayar layanan, sisanya tidak dapat dibayarkan dengan tunai.

Bahkan konsumen dapat melakukan *top up* dengan membuka *My Wallet* dan klik di tombol 'Top Up', kemudian menransfer ke nomer rekening salah satu bank swasta minimal Rp100.000, lalu isi *form* Top Up di bawah tata cara pengisian. Setelah validasi, maka Go-Jek Credit akan tertambahkan secara otomatis ke dalam *My Wallet* para konsumen.

Hingga kini sekitar 2 juta orang mengunduh aplikasi Go-Jek. Aplikasi tersebut akan terus dikembangkan untuk memudahkan konsumen. Bahkan, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mewacanakan Go-Jek terintegrasi sebagai *feeder* layanan Transjakarta dan MRT, sehingga pengemudi Go-Jek dapat memiliki potensi penghasilan yang rutin. *Go, Go-Jek.* 



## Tabungan, Apa Itu?

**A**pa itu produk tabungan? Apakah produk ini sama dengan jenis simpanan yang lain seperti giro dan deposito? Manakah yang lebih menguntungkan, menyimpan uang dalam produk tabungan, giro, atau deposito? Bagaimana menentukan produk tabungan yang tepat dari 118 bank di Indonesia?

Pertanyaan tersebut mungkin pernah muncul dalam pikiran Anda. Untuk menjawabnya, ada baiknya Anda mengenali dulu apa itu produk tabungan.

*Nah*, jadi seperti apa bentuk produk bernama tabungan tersebut?

Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pedia, tabungan diartikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Namun, dana dari produk ini tak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Hingga kini OJK menyebut kalangan perbankan terus mengembangkan produk tabungan. Jika dulu dana harus diambil ke jaringan kantor bank, kini dana dalam tabungan dapat ditarik melalui

mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dan jaringan elektronik *banking* lainnya.

Sementara itu, OJK pedia memaparkan deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (*time deposit*). Adapun giro berarti simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (*giro; checking accounts*).

Dari penjelasan tersebut, jika dibanding dengan produk deposito, tabungan bisa ditarik kapan saja. Perbedaannya dengan produk giro, yakni penarikan dana tabungan tak menggunakan cek atau bilyet giro.

Dibandingkan dengan produk-produk lainnya, produk tabungan memang paling fleksibel. Dana yang disimpan di produk ini bisa ditarik kapan saja dari media yang ditawarkan bank tempat menabung.

Bunga yang dikenakan pada produk tabungan pun umumnya di bawah produk deposito.

Lalu bagaimana cara memilih produk tabungan?

Menurut Perencana Keuangan Salama Mitra Investa Endy Kurniawan, sebelum memilih jenis produk tabungan calon nasabah perlu mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan keuangannya.


Jika dana yang dimiliki ingin memberikan imbal hasil, maka *cuan* tersebut sebaiknya jangan ditaruh di tabungan, melainkan di instrumen investasi. Namun jika ditujukan untuk dana darurat atau untuk kebutuhan sehari-hari, maka simpan dalam bentuk tabungan.

Kemudian, tentukan apakah dana tersebut akan ditujukan untuk apa. Jika untuk dana haji, maka pilih jenis produk tabungan haji yang sesuai. Namun jika untuk dana sehari-hari, maka gunakan tabungan biasa.

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan yakni reputasi bank. "Sebetulnya kombinasi antara sisi keamanan, reputasi bank, dan kemudahan dalam mengakses dana tersebut. Bahkan juga perlu dipertimbangkan kemudahan untuk memperoleh pinjaman dari bank tersebut," jelas Endy.

Hal lain yang bisa dipertimbangkan yakni jaringan mesin ATM yang dimiliki bank tersebut. Perhatikan juga fasilitas lainnya seperti layanan *internet banking* dan *mobile banking* untuk produk tabungannya. Sebab fasilitas ini mempermudah nasabah untuk bertransaksi tanpa perlu ke kantor cabang.

Jangan lupa pula memperhatikan bank tempat kita menabung masuk dalam daftar entitas yang diawasi OJK. Selain itu, simpanan bank tersebut juga harus dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Gunanya agar dana yang Anda simpan tetap aman dan terjamin.

Jadi, selamat memilih produk tabungan yang sesuai! 

# Mengenal Lebih Dekat Investasi Saham

**K**etika pertama kali ingin berinvestasi di pasar modal, dalam benak Anda sudah pasti langsung terpikir kata saham. *Ya*, saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Pada dasarnya, ada dua keuntungan investor dengan membeli atau memiliki saham, yakni dividen dan *capital gain*.

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS.

Dividen dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan uang tunai dalam jumlah rupiah

tertentu untuk setiap saham. Namun, dividen dapat berupa saham yang artinya setiap pemegang saham diberikan sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.

Sementara itu, *capital gain* merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.

Meski memberikan keuntungan yang menarik, investasi saham juga memiliki risiko yang tinggi. Saham memiliki risiko *capital loss* dan risiko likuidasi. *Capital loss* kebalikan dari *capital gain*, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli.

Sedangkan, risiko likuidasi misalnya, perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan, sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham.

Namun, jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham.

Oleh karena itu, seorang pemegang saham dituntut untuk terus mengikuti perkembangan perusahaan.


Pada dasarnya, bukan hanya saham instrumen investasi yang penuh risiko, apalagi investasi di pasar modal. Pasalnya, semua investasi selalu terkait dengan potensi risiko, tanpa melihat bentuk investasi tersebut.

Di tengah kondisi pasar saham yang sedang bergejolak saat ini, investasi di saham kian berisiko. Untuk pemula yang baru mau masuk ke instrumen saham, sebaiknya bermain aman terlebih dahulu.

Misalnya, mulailah dengan modal yang tidak terlalu besar. Dengan modal tidak terlalu besar, bila salah langkah, kerugian yang diderita tidak terlalu besar.

Kemudian beli saham dengan fundamental atau kinerja perusahaannya baik. Biasanya saham berfundamental baik adalah saham *blue chip*. Cirinya perusahaan ini dikenal publik, punya usaha yang jelas, produknya laku di pasaran, tidak banyak utang, manajemen transparan dan sebagainya. Jangan tergiur untuk membeli saham gorengan yang pergerakan harganya tidak jelas.

Mengapa memilih saham *blue chip*? Saat pasar saham terkoreksi, saham *blue chip* juga terkoreksi. Tetapi setelah pasar saham pulih, saham *blue chip* biasanya bergerak naik lebih dulu dan lebih cepat dari yang lain.

Selain itu, investor sebaiknya melakukan diversifikasi. Jadi, membeli beberapa jenis saham untuk membagi risiko. Investor juga dianjurkan untuk belajar melakukan analisis untuk menentukan keputusan menjual atau membeli saham. Ada dua analisis yang digunakan, yakni analisis teknikal dan analisis fundamental. 



# Menyiapkan Jaminan Masa Depan

Sebagian kalangan menilai berlakunya program Jaminan Pensiun yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membuat tantangan yang dihadapi industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan semakin berat.

Di sisi lain, keberadaan program wajib tersebut juga dianggap saling melengkapi dengan produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Bahkan, jaminan sosial wajib itu diyakini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan akan masa depan.

Sebelum lebih jauh membahas produk DPLK dan potensi perkembangannya ke depan, terlebih dahulu kiranya penting untuk memahami dana pensiun secara umum.

Undang-Undang No.11/1992 tentang Dana Pensiun menjelaskan Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Ada dua jenis dana pensiun, yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Secara singkat, perbedaan perbedaan keduanya terletak pada penyelenggara dan jenis iuran yang disetorkan.

DPPK dibentuk orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku

pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti selain program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

DPPK dapat disebut sebagai Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan jika menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

Adapun, DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Dalam hal ini, program pensiun manfaat pasti menjanjikan besar manfaat yang telah ditetapkan dengan rumus tertentu di awal kesepakatan. Dengan begitu, iuran merupakan hasil estimasi kebutuhan biaya untuk merealisasikan manfaat pensiun. Besar manfaat pada program pensiun iuran pasti berbanding lurus dengan iuran yang disetor dan hasil pengembangannya.

Sekilas manfaat yang ditawarkan dana pensiun serupa dengan jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua. Program pensiun tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak pekerja atau karyawan untuk hidup layak pada hari tua atau masa pensiun.

Dana pensiun tidak tumpang tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi saling melengkapi sebagai bagian dari fasilitas program kesejahteraan karyawan.

BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat wajib merupakan program jaminan sosial dengan manfaat perlindungan dasar dan layak, sedangkan DPLK yang bersifat sukarela lebih mengedepankan manfaat kesejahteraan karyawan yang maksimum.

Lantas, apa saja produk yang ditawarkan DPLK? Ada dua jenis produk DPLK, yakni DPLK reguler atau konvensional dan DPLK Kompensasi Pesangon (PPUKP).

DPLK reguler dibukukan atas nama karyawan (*allocated fund*) untuk masa pensiun karyawan, sedangkan DPLK PPUKP dibukukan atas nama perusahaan (*pooled fund*) untuk menyiapkan dana pesangon apabila suatu saat perusahaan harus membayarkan pesangon karyawannya.



**“...hingga saat ini kesadaran perusahaan untuk mengelola dana pensiun dan dana pesangon semakin membaik seiring dengan edukasi yang dilakukan.”**

Ketua Asosiasi DPLK Nur Hasan Kurniawan mengatakan hingga saat ini kesadaran perusahaan untuk mengelola dana pensiun dan dana pesangon semakin membaik seiring dengan edukasi yang dilakukan.

Menurutnya, pada semester I/2015 dana kelolaan dana pensiun lembaga keuangan telah mencapai Rp42 triliun. Jumlah dana kelolaan itu bertumbuh sekitar 20% dibandingkan capaian akhir 2014 yang tercatat Rp35 triliun.

“Pertumbuhannya selama enam bulan itu sangat luar biasa,” ungkapnya.

Nur Hasan menjelaskan pada periode tersebut pertumbuhan produk DPLK reguler dan DPLK PPUKP cukup berimbang. Bahkan, nilai dana kelolaan PPUKP pada Mei 2015 sudah mencapai Rp7 triliun atau sudah melampaui target dana kelolaan yang dipatok Rp6 triliun sampai akhir tahun.

PPUKP merupakan program yang diluncurkan OJK pada 2013 sebagai salah satu upaya mendongkrak bisnis dana pensiun. Saat ini, dana kelolaan itu berasal dari 18 perusahaan. Padahal, pada tahun lalu jumlah pelaku baru mencapai tujuh perusahaan.


Pertumbuhan serupa, jelas Nur Hasan, juga masih berpotensi terjadi ke depan kendati program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan mulai diwajibkan pemerintah.

Bergulirnya program nasional pemerintah itu memang akan berdampak pada pertumbuhan industri. Pemberi kerja yang sebelumnya memanfaatkan jasa DPLK tentunya

akan cenderung memilih program wajib pemerintah untuk menjamin masa pensiun pekerjaanya.

Namun, potensi pasar yang ada saat ini masih cukup besar. Karena itu, dia berharap pemerintah terus mengarahkan edukasi yang tepat kepada masyarakat terkait pentingnya jaminan pensiun.

“Ke depan kami masih bisa tumbuh, tetapi dibutuhkan pendekatan edukasi yang lebih intens,” ungkapnya.

Apalagi iuran program Jaminan Pensiun dalam sistem jaminan sosial nasional ternyata hanya sebesar 3% dari rencana awal 8% membuat pasar DPLK kembali terbuka. 

# Kebutuhan Asuransi Kesehatan

**K**eberadaan layanan asuransi kesehatan swasta diyakini tetap penting meski Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sudah bergulir.

Program pemerintah itu justru digadang ikut membuka pasar baru khususnya bagi masyarakat menginginkan pelayanan fasilitas yang lebih lengkap.

Pasalnya premi terjangkau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menawarkan manfaat sesuai prosedur tertentu, sehingga bersifat terbatas, sedangkan asuransi kesehatan menawarkan manfaat kepada pemegang polis dengan fasilitas yang lebih luas.

Asuransi kesehatan merupakan salah satu produk industri asuransi yang memberikan jaminan finansial kepada tertanggung untuk kebutuhan biaya pengobatan dan perawatan saat terganggu kesehatannya.

Umumnya, melalui produk asuransi kesehatan, penyedia jasa swasta memberikan berbagai manfaat mulai dari jaminan finansial untuk rawat inap, rawat jalan, hingga kebutuhan spesifik seperti persalinan, perawatan gigi, dan *general check up*.

Produk asuransi ini terdiri dari dua jenis, yakni asuransi kesehatan perorangan dan asuransi kesehatan kumpulan atau kelompok.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Julian Noor mengatakan saat ini produk jaminan kesehatan yang ditawarkan kebanyakan

berjenis asuransi kumpulan. Perusahaan asuransi swasta lebih banyak menawarkan jenis produk tersebut karena potensi pesertanya yang jauh lebih besar.

Adapun asuransi kesehatan perorangan yang sering memakai sistem *cash plan* atau jaminan biaya sesuai dengan hari perawatan, jumlahnya lebih sedikit. Padahal potensi permintaan produk asuransi jenis ini terbilang tinggi.

Menurut Julian, produk tersebut dapat menjangkau individu yang tidak bekerja secara formal. "Mereka juga asuransi kesehatan. Pertanyaannya, kenapa tidak banyak perusahaan yang masuk ke situ?"

Julian mengatakan penilaian risiko pada asuransi kumpulan jauh lebih mudah. Para pekerja pada sebuah perusahaan umumnya telah melalui serangkaian tes kesehatan standar sehingga risiko dapat dijamin perusahaan asuransi swasta. Kondisi yang berbeda terjadi pada asuransi perorangan.

Di samping itu, Julian mengatakan bahwa hingga saat ini perusahaan asuransi mesti menemukan cara yang paling efisien untuk memasarkan produk asuransi perorangan. "Bagaimana caranya masuk ke orang per orang dengan biaya yang murah," ujarnya.

Kondisi semacam itu menjadi tantangan yang dihadapi para pelaku industri asuransi. Terlebih lagi dengan berjalannya Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan membuat para penyedia jasa dihadapkan pada tantangan untuk menghadirkan produk yang lebih inovatif.

Melalui potensi pasar yang sangat besar, perusahaan asuransi swasta dapat memanfaatkan keunggulannya, misalnya melalui inovasi produk dengan standar *cover* khusus maupun produk *taylor made*.

"Sehingga lebih luas dari jangkauan BPJS dan dapat disesuaikan dengan keinginan pihak tertanggung."

## Edukasi Asuransi


Di sisi lain kehadiran BPJS Kesehatan ternyata juga membawa angin segar bagi industri asuransi, khususnya edukasi sektor jasa keuangan.

Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya mengerti akan keberadaan dan manfaat penting jaminan finansial bagi kondisi kesehatan di masa depan.

Menurut Presiden Direktur PT Central Asia Financial Reginald J. Hamdani, saat ini literasi layanan jasa keuangan, khususnya asuransi, sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Pasalnya, pemerintah terus mensosialisasikan BPJS.

Meski demikian, dia menilai kondisi itu masih jauh dari yang ideal. Apalagi masyarakat kebanyakan masih melihat asuransi sebagai produk yang 'dijual', bukan 'dibeli'.

"Artinya, orang mesti didorong atau ada yang jual baru ada yang beli. Seharusnya, orang *aware* dan ingin membeli," katanya.

Dia meyakini semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan, niscaya bermuara pada kebutuhan akan produk asuransi lainnya. 



## Lembaga Gadai Resmi

# “Pemahaman Masyarakat Masih Kurang”

**F**rans Padji nampaknya paham betul manfaat layanan jasa keuangan khusus gadai. Peralnya, pria yang saat ini bekerja lepas ini sering menggunakan jasa lembaga keuangan itu untuk mendapatkan dana tunai semasa kuliah.

Pusat gadai swasta, ujarnya, menjadi pilihan utama karena persyaratannya mudah dibanding perusahaan gadai milik negara, PT Pegadaian. Jasa gadai swasta juga semakin banyak dan mudah ditemui, khususnya di Jakarta. “Bunganya memang mencekik, tapi persyaratan adminstrasinya tidak ribet. Cukup tunjukkan KTP, serahkan barang dan duit-nya cair,” ungkapnya.

Namun, Frans baru-baru ini menyadari ternyata proses administrasi layanan gadai di PT Pegadaian juga tidak rumit. Calon nasabah BUMN itu pun cukup membawa agunan, baik berupa perhiasan maupun kendaraan dan alat elektronik untuk memperoleh kredit secara cepat dan aman. “Saya baru tahu, Pegadaian juga bisa menerima barang elektronik, tidak sebatas barang perhiasan dan sertifikat.”

Tidak hanya Frans, kurangnya pemahaman akan fungsi lembaga gadai resmi juga masih dialami sebagian besar masyarakat.

Direktur Bisnis I PT Pegadaian, Harianto Widodo, mengakui masih banyak yang belum paham fungsi perseroan secara umum. Akibatnya, manfaat yang ditawarkan perseroan

belum dimaksimalkan oleh masyarakat. “Masyarakat seringkali hanya mengenal Pegadaian sebagai BUMN yang menyediakan jasa gadai, padahal ada layanan lain yang diberikan,” jelasnya.

### Tiga lini bisnis

Dia menuturkan layanan jasa keuangan PT Pegadaian dibedakan dalam tiga lini bisnis, yakni pembiayaan, perdagangan emas dan usaha lainnya. Lini bisnis pembiayaan memiliki dua skema, yaitu berbasis gadai dan fidusia. Pembiayaan berbasis gadai memungkinkan masyarakat memperoleh kredit dengan agunan seperti emas, kendaraan bermotor dan barang elektronik.

Pembiayaan berbasis fidusia mensyaratkan agunan benda bergerak, berupa surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKP), sehingga kendaraan masih dapat digunakan debitur. “Masyarakat hanya tahunya gadai saja, padahal ada pembiayaan berbasis gadai dan ada berbasis fidusia,” kata Harianto.

Sejumlah produk pada lini bisnis pembiayaan, antara lain kredit cepat aman (KCA), Krasida, Kreasi dan Kredit Multi Guna. PT Pegadaian juga mengembangkan lini pembiayaan berbasis syariah dengan sejumlah produk, yakni pembiayaan Rahn, Arrum dan Amanah.

“Layanan pembiayaan kami sangat ritel, dengan minimum satu juta

rupiah dan maksimal Rp200 juta. Kami menawarkan solusi pembiayaan dengan akses gampang, bunga kompetitif, serta memiliki banyak outlet,” tuturnya.

Lini bisnis lain PT Pegadaian adalah layanan jual dan titip emas. Usaha ini sebenarnya memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan emas, baik individu maupun kolektif.


Lanjutnya, PT Pegadaian menawarkan layanan penjualan emas secara tunai atau angsuran melalui produk Mulia. Ada juga layanan titip-jual emas yang ditawarkan perseroan dalam produk Konsinyasi Emas.

Produk terbaru yang diluncurkan perseroan adalah tabungan emas. Proyek yang tengah diujicobakan di 78 kantor PT Pegadaian itu menawarkan investasi emas yang sangat terjangkau bagi masyarakat.

Hanya dengan harga Rp5.000, kata Harianto, masyarakat dapat menjual dan membeli emas dengan fasilitas titipan yang ditawarkan PT Pegadaian. Dia menyatakan dengan menabung setiap bulan, nasabah akan membeli emas dalam satuan terkecil seperseratus gram.

Nilai emas dalam satuan gram akan diakumulasikan dalam saldo tabungan dan kemudian dicetak dengan nilai minimal lima gram. “Ini masih *piloting*. Konsepnya adalah menabung emas, bukan menabung uang.”

Logam mulia itu menjadi salah satu instrumen investasi dengan nilai terjaga sehingga dapat diagunkan lagi untuk memperoleh pembiayaan.

Menurut dia, pihaknya memiliki lini bisnis ketiga yakni Aneka Jasa yang menawarkan jasa keuangan khusus lainnya, antara lain Kucica atau layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri, serta jasa taksiran, titipan dan sertifikasi batu mulia. 

# Perluasan Pembiayaan *Multifinance*

Akhir tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas cakupan jenis pembiayaan *multifinance* dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam beleid itu, perusahaan pembiayaan dapat membiayai berbagai macam produk dan jasa baru.

Sebelumnya, cakupan pembiayaan perusahaan hanya meliputi pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak piutang, dan kartu kredit. Keluarnya beleid ini membuat *multifinance* kini bisa membiayai segmen lain berupa investasi, modal kerja, dan multiguna.

Sejumlah *multifinance* pun sudah berekspansi ke tiga sektor itu. Beberapa contoh produk yang dibiayai yakni pembiayaan maritim dan pembiayaan pendidikan.

Pembiayaan maritim merupakan salah satu produk baru *multifinance* yang bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis pembiayaan, yakni pembiayaan berbasis modal kerja serta investasi.

Efrinal Sinaga, Ketua Pokja Kemaritiman dan Sekjen Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), mengatakan pada tahap awal, pembiayaan maritim dikhususkan ke sektor kelautan dan perikanan yang memiliki keterbatasan akses kredit ke perbankan.

"Kami sosialisasikan agar akses pembiayaan ke nelayan ini jadi terbuka,

sehingga pelan-pelan bisa menggantikan ketergantungan mereka terhadap rentenir atau tengkulak,"katanya.

Sejauh ini terdapat lima subsektor utama di bidang kelautan dan perikanan yang prospektif untuk didanai perusahaan pembiayaan.

*Pertama*, kapal tangkap dan pengangkut berukuran 10 gross ton (GT), 30 GT, 60 GT, dan 80 GT. Kredit kepemilikan kapal bahkan merupakan fasilitas yang paling banyak dibutuhkan para calon kreditor.

*Kedua*, pembangunan *Solar Packaged Dialer Nelayan (SPDN)* atau sistem pengisian bahan bakar nelayan di darat dan laut. Subsektor ini menjadi kebutuhan kedua terbanyak dari hasil survei.

*Ketiga*, calon kreditor juga membutuhkan armada angkut yang disertai dengan pendingin atau *cold storage* guna menjamin hasil perikanan tetap segar dalam proses distribusi.

*Keempat*, modal kerja koperasi atau gabungan kelompok nelayan. Subsektor ini juga diklaim memiliki prospek pembiayaan cukup bagus. *Kelima*, pengadaan investasi budidaya termasuk unit pengolahan ikan.

Hingga kini perusahaan pembiayaan masih menggodok skema dan mekanisme pembiayaan maritim melalui konsorsium. Setidaknya terdapat 12 perusahaan pembiayaan yang tergabung dalam konsorsium untuk menyalurkan pembiayaan.

OJK menargetkan total penyaluran pembiayaan maritim bisa mencapai Rp500 miliar sampai akhir tahun ini.

## Pembiayaan Pendidikan

Berbeda dengan maritim, pembiayaan pendidikan digolongkan ke dalam jenis pembiayaan multiguna.

Pembiayaan multiguna didefinisikan sebagai pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.


Dalam beleid yang dirilis OJK disebutkan pembiayaan multiguna wajib dilakukan dengan beberapa cara seperti sewa pembiayaan, pembelian dengan pembayaran secara angsuran dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Sejumlah *multifinance* telah memperlihatkan minatnya untuk masuk ke ranah multiguna. Ada yang ingin masuk ke pembiayaan rumah, pernikahan, ada pula yang menasar sektor pendidikan.

Mandiri Tunas Finance (MTF) misalnya, telah meluncurkan produk itu pada akhir semester I/2015.

Sambil mengangsur cicilan mobil setiap bulan kepada MTF, konsumen juga ditawarkan angsuran pembayaran sekolah dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil.

Nantinya, MTF akan melakukan pembayaran kepada universitas, sedangkan nasabah membayar cicilan per bulan sesuai dengan tenor dan biaya pendidikan.

Direktur Utama MTF Ignatius Susatyo Wijoyo mengatakan tenor terlama yang ditawarkan MTF, yakni lima tahun. 

# Peluncuran Buku Menjawab Tantangan *E-Banking*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku bertajuk "Bijak Ber-eBanking" di Jakarta pada Senin (14/11). Buku ini diharapkan mampu menjawab sebagian kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan dan penggunaan *electronic banking (e-banking)*. Namun, kehadiran buku ini tidak menjamin bahwa

penyelenggara dan pengguna produk *e-banking* terbebas dari risiko finansial maupun non finansial saat bertransaksi dengan *e-banking*.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan buku tersebut dikemas supaya pembaca mudah memahami apa dan bagaimana proses *e-banking*. Untuk itu disertakan beberapa contoh kejadian seputar *e-banking* beserta ilustrasinya, yang terjadi di Indonesia dan luar negeri.

"Perkembangan teknologi yang semakin maju seiring dengan peningkatan kebutuhan dan tuntutan masyarakat mempengaruhi produk dan aktivitas perbankan, baik dari sisi keberagaman, kecepatan, maupun fleksibilitas waktu transaksi, termasuk keamanan dan kenyamanan," ujarnya saat peluncuran buku tersebut.

Dia menjelaskan penerbitan buku "Bijak Ber-eBanking" ini dinilai tepat dan dapat menjadi satu pilihan alternatif untuk



ikut menjawab beragam kebutuhan di atas. Buku "Bijak Ber-eBanking" dapat diunduh gratis dari laman [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

## Modus *E-Banking*

Buku tersebut menjelaskan dan menguraikan gambaran umum mengenai jenis-jenis dan manfaat layanan serta modus penyalahgunaan *e-banking*, sehingga diharapkan dapat digunakan oleh nasabah, bank maupun pengawas bank terkait.

*E-banking* itu juga dapat ditemui di lembaga perbankan syariah. Melalui *e-banking*, nasabah bank syariah dapat bertransaksi selama 24 jam, tujuh hari seminggu.


Layanan transaksi melalui *e-banking* dapat berupa transfer dana antar rekening atau antar bank, membayar zakat, membayar tagihan listrik, telepon, premi asuransi, dan kartu pembiayaan, membayar tiket pesawat, hingga membeli pulsa isi ulang telepon seluler. Nasabah juga dapat mengecek saldo, memperoleh

informasi mutasi rekening, dan mengganti PIN.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Irwan Lubis saat Seminar dan Peluncuran Buku *Bijak e-Banking* di Hotel Borobudur Jakarta itu menuturkan dalam beberapa tahun terakhir jumlah nasabah, frekuensi, dan nilai transaksi *e-banking*

di Indonesia berkembang signifikan. Frekuensi penggunaan *e-banking* pada 2012 tercatat Rp 3,79 miliar naik menjadi Rp 4,73 miliar pada 2013, dan pada 2014 kembali naik menjadi Rp 5,69 miliar di tahun 2014. Untuk volume *e-banking* meningkat mulai dari Rp 4.441 triliun pada tahun 2012, Rp 5,495 triliun di tahun 2013, dan Rp 6,447 triliun pada 2014.

"Ke depan *volume* transaksi akan meningkat tajam. Ini akan menciptakan efisiensi biaya, tidak perlu menggunakan kantor dan jumlah karyawan berkurang. Prinsipnya bisa dilakukan kapan dan di mana saja serta debit waktu tidak terbatas," jelasnya.

Irwan menyebutkan saat ini saluran yang digunakan pun semakin beragam. Ke depannya, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat (*less cash society*), jumlah nasabah, frekuensi dan nilai transaksi *e-banking* tersebut akan semakin mendominasi transaksi perbankan. 





# FGD untuk menghadang Investasi Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Investasi Ilegal "Terobosan Dalam Upaya Mencegah dan Mengatasi Investasi Ilegal" di Surabaya pada Senin (3/8/2015). Dalam kegiatan tersebut sejumlah praktisi di bidangnya menyampaikan pendapat mengenai investasi ilegal.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono dalam pengantar FGD tersebut

menyatakan investasi ilegal atau yang lazim disebut investasi bodong dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. "Padahal lembaga keuangan bekerja berdasarkan kepercayaan," katanya.

Menurut dia, tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan pada gilirannya berdampak pada stabilitas keuangan. Oleh karena itu, lanjut Kusumaningtuti, OJK gencar mengedukasi masyarakat untuk tidak menanamkan uangnya ke praktik investasi ilegal.

"OJK pada bulan Juli lalu mengeluarkan 35 paket kebijakan yang berisi pencegahan investasi ilegal," ujarnya.

Lembaga ini hingga Juli 2015 mengidentifikasi terdapat 334 perusahaan investasi yang diduga ilegal. Perusahaan itu tidak hanya perusahaan yang menghimpun dana masyarakat, tapi juga perusahaan yang menyalurkan dana kepada masyarakat.

Dalam FGD tersebut, sejumlah praktisi di bidangnya menyampaikan pendapat antara lain Paripurna P.



**“OJK pada Juli lalu mengeluarkan 35 paket kebijakan. Kebijakan ke 35 berisi pencegahan investasi ilegal.”**



Suganda, Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kepala Prodi S2 Sosiologi FISIP Universitas Airlangga Surabaya Mustain Mashud, Editor Senior Harian Kompas Pieter P. Gero, dan Kasubdit Perbankan Bareskrim, KBP Umar Sahid.

Pariurna dalam makalahnya menyampaikan tentang adanya kekosongan hukum pada masalah larangan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (pasal 46 UU Perbankan), tanpa seizin Bank Indonesia, bukan OJK. Selain itu, ada kekosongan hukum dalam pengertian masyarakat atau publik,


lantas tentang skema keanggotaan dalam koperasi belum dibahas.

Sementara itu, Mustain Mashud, menuturkan tentang persepsi terhadap investasi ilegal dikarenakan keterjebakan sistem budaya patronase, feodal, dan mistis. Bahkan dia menambahkan kondisi transisional masyarakat memengaruhi cara pemaknaan terhadap investasi ilegal.

Pieter P. Gero menyampaikan bahasan bahwa media berupaya mengingatkan masyarakat banyak menyangkut investasi bodong. “Banyak berita menyangkut kasus investasi bodong dan langkah

hukum yang diambil aparat, tapi sifat rakus memperoleh imbal hasil investasi yang tinggi membuat masyarakat lupa,” jelasnya dalam makalah bahasan.

Menurut dia literasi keuangan yang belum meluas semakin membuat masyarakat seperti “keledai yang terus jatuh pada lubang yang sama”.

Namun, kata Peter, media, OJK, pemerintah dan aparat hukum tak harus putus asa. “Selain terus melaporkan kasus investasi bodong, upaya mendorong literasi keuangan dan inklusi keuangan harus terus dilakukan.” 



# Penyandang Disabilitas Dapat Kelola Keuangan Secara Benar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang memberikan edukasi tentang Literasi Keuangan kepada penyandang disabilitas di Hotel Dafam Semarang, Minggu (23/8/2015).

Pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan kepada penyandang disabilitas di Semarang merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di Surabaya pada 27 April 2015.

Selama ini, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus ini merasa termarginalkan dalam menerima akses maupun pelayanan perbankan.

Kepala Regional IV OJK Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Y. Santoso Wibowo menyatakan pelaksanaan sosialisasi *financial literacy* bagi insan disabilitas merupakan salah satu upaya OJK dalam meningkatkan literasi kepada masyarakat

berkebutuhan khusus.

Menurut dia, banyak kesulitan yang dialami penyandang disabilitas dalam aksesibilitasnya pada produk/layanan jasa keuangan.

*Pertama*, kurang *melek*-nya mereka dalam dunia keuangan (*financial illiterate*). Mereka tidak mampu membuat perencanaan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana merencanakan investasi yang tepat untuk masa tuanya, dan bahkan hak mereka dalam mengakses jasa keuangan. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan yang dimiliki penyandang disabilitas itu sendiri yang tergolong masih rendah.

*Kedua* adalah banyaknya produk/layanan jasa keuangan yang tidak aksesibel baik secara infrastruktur maupun secara sistem keuangan yang tertera dalam aturan-aturan sistem keuangan. Kebutuhan aksesibilitas dalam infrastruktur, seperti

*ramp* bagi kursi roda, *guide block*, toilet khusus, ATM khusus, dan *assistive* teknologi lainnya menjadikan penyandang cacat tidak dapat mengakses produk/layanan jasa keuangan.

Banyak sekali kasus di berbagai daerah bahwa difabel tidak diizinkan menabung atau meminjam, karena tidak ada pelayanan berbasis huruf *braille* dan perangkat lainnya. Secara sistem keuangan banyak difabel dianggap bukan bagian dari "*bankable people*", karena mereka bagian dari kelompok *low income*.

Selain itu, banyak kasus terjadi menunjukkan bahwa difabel selama ini dianggap sebagai orang yang "tidak cakap hukum" sehingga banyak yang tidak mampu mengakses layanan jasa keuangan.

Hasil survey Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan oleh OJK tahun 2013 pada 8.000 responden menunjukkan tingkat



**“Penelitian oleh PSDL menunjukkan 50% penyandang disabilitas tidak memiliki tabungan dan 48,98% mempunyai tabungan. Dari mereka yang menabung, 70,45% tidak pernah menabung di jasa keuangan dan 29,55% sisanya menyatakan bahwa mereka pernah menabung.”**



literasi masyarakat Indonesia hanya 21,84 % dengan tingkat inklusi (utilitas) 59,74%. Tingkat inklusi yang lebih tinggi dibandingkan tingkat literasi keuangan menandakan bahwa tidak seluruhnya konsumen jasa keuangan paham akan produk/layanan jasa keuangan yang dimiliki.

Dilihat dari penggolongan kelompok masyarakat berdasarkan pengeluaran diketahui bahwa golongan C, D dan E memiliki tingkat literasi yang rendah yaitu masing-masing masih dibawah 40% dengan tingkat inklusi dibawah 1,5. Data ini menunjukkan akses masyarakat terhadap produk/jasa keuangan sangat rendah, sedangkan tingkat inklusi keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam menanggulangi kemiskinan.

Angka tersebut menjadi lebih rendah lagi nilainya jika ditujukan untuk masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini

karena masyarakat penyandang disabilitas adalah masyarakat minoritas dalam minoritas (*minority within a minority*), dan ini bukan hanya diskriminasi, tapi juga karena sebagian besar tergolong miskin dan tidak berpendidikan.


### Terbesar ketiga

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penyandang disabilitas terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Permasalahan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas menjadi masalah tersendiri. Survei Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) menunjukkan 94% penyandang disabilitas tidak pernah mencatat keuangan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan hanya 6% yang memiliki catatan dengan baik atas

keuangan sehari-hari. Dengan demikian perencanaan dan pengaturan keuangan penyandang disabilitas belum terencana dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh PSDL menunjukkan bahwa 50% penyandang disabilitas tidak memiliki tabungan dan 48,98% mempunyai tabungan. Dari mereka yang menabung, 70,45% penyandang disabilitas tidak pernah menabung di jasa keuangan dan 29,55% sisanya menyatakan bahwa mereka pernah menabung. Kondisi demikian sangat memprihatinkan.

Melihat kondisi tersebut, OJK akan terus melakukan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, termasuk bagi kaum disabilitas serta mendorong pelaku usaha jasa keuangan untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan para insan difabel tersebut. 

# Membentuk Penyuluh untuk Komunitas



Edukasi Komunitas dan *Training of Trainers* (TOT) penyuluh perencanaan keuangan diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gorontalo pada 27-28 Juli 2015. Kegiatan tersebut diarahkan bagi para pegawai kantor urusan agama, guru dan penyuluh keluarga berencana, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kegiatan yang diprakarsai oleh OJK bekerja sama dengan pemerintah daerah Gorontalo ini diikuti oleh 50 orang dari berbagai wilayah di Gorontalo ikut dalam.

Kusumaningtuti S Soetiono, Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan



serta hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan. Selain itu, diharapkan para peserta dapat menjadi penyuluh di komunitas dan masyarakat dengan menyampaikan pengetahuan yang diperolehnya selama dua hari pelatihan.

“Nantinya para peserta diharapkan mampu menyadarkan masyarakat mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan. Kami berkeyakinan dengan kegiatan ini masyarakat lebih berhati-hati memanfaatkan produk dan jasa





**“Para peserta diharapkan mampu menyadarkan masyarakat mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan. Kami berkeyakinan dengan kegiatan ini masyarakat lebih berhati-hati memanfaatkan produk dan jasa keuangan.”**




keuangan,” katanya di Gorontalo. Berdasarkan hasil survei nasional 2013, diketahui bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia hanya sebesar 21,84% dengan tingkat inklusi sebesar 59,74%.

Untuk menunjang kegiatan ini, OJK mengundang pakar keuangan dari FPSB (*Financial Planning Standard Board*). *Financial*

*Planner* ini akan memberikan materi perencanaan keuangan dan simulasi pengelolaan uang sehari-hari. “Melalui materi perencanaan keuangan ini harapannya peserta dapat membuat rencana keuangan sendiri. Minimal membuat buku catatan pemasukan dan pengeluaran keuangan sehari-hari. Ini yang diharapkan diduplikasi di

masyarakat ketika mereka menjadi *trainer*,” ujarnya.

Selain itu, terdapat materi dari lembaga jasa keuangan (LJK) mengenai produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. LJK tersebut di antaranya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta dari PT Pegadaian (Persero). 



# Kegiatan Menabung Melatih Anak Mengelola Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan mengembangkan produk tabungan yang diberi nama Simpanan Pelajar (SimPel). Produk SimPel ini merupakan salah satu upaya OJK dalam membangkitkan kembali budaya menabung sejak dini bagi pelajar.

Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad, produk ini merupakan tabungan bagi para peserta didik mulai jenjang PAUD/Raudatul Athfal (RA) hingga SMA/Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren yang diterbitkan secara nasional oleh perbankan di Indonesia. Tujuan program ini adalah agar para pelajar sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadikan kegiatan menabung bukan hanya sebagai kewajiban melainkan kebutuhan atau bahkan gaya hidup.

Dia menjelaskan budaya menabung penting dimulai sejak dini agar dapat mendidik anak untuk mampu mengendalikan diri dalam bersikap konsumtif serta belajar untuk dapat membelanjakan uang yang dimilikinya secara bijak. "Selain itu, kegiatan menabung dapat melatih anak dalam mengelola keuangan secara bertahap, sehingga pada saatnya nanti mereka dapat tumbuh menjadi masyarakat yang terampil dalam hal pengelolaan

keuangan dan pada akhirnya akan mencapai kesejahteraan keuangan," ujarnya, Selasa (8/9/2015). Produk SimPel ini pertama kali diluncurkan pada 14 Juni 2015 oleh Presiden RI, Joko Widodo. Pada saat diluncurkan tabungan ini fokus pada simpanan pelajar perbankan syariah (SimPel iB) yang diikuti oleh delapan bank umum syariah.

Kegiatan aktivasi program Tabungan SimPel yang dilaksanakan pada 8 September 2015 di SMAN 68 diikuti oleh 8 (delapan) bank umum konvensional yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, BTN, Bank Permata, Bank Jabar-Banten dan Bank Jatim) dan 6 (enam) bank umum syariah (Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah, dan Panin Syariah).

Selain itu secara statistik, jumlah pelajar SD, SMP, dan SMA dibandingkan dengan total populasi Indonesia menunjukkan angka yang signifikan, yaitu 20% dengan rincian sekitar 38,8 juta siswa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan sekitar 11 juta siswa di bawah Kementerian Agama (Kemenag).


Dilihat dari keadaan tersebut, peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya kelompok pelajar masih sangat besar. "Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah model produk

keuangan dengan karakteristik dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan kelompok siswa," jelas Muliaman.

Dia menuturkan keunikan dan keunggulan dari tabungan ini antara lain nama siswa tercantum pada buku tabungan, setoran awal yang ringan, bebas biaya administrasi bulanan, minimum setoran yang terjangkau setiap kali menabung.

SimPel/SimPel iB tidak memberikan bunga, namun sebagai gantinya siswa akan mendapatkan program *reward* sesuai kebijakan dari setiap bank. "Dengan adanya produk ini, masyarakat diharapkan kembali mengangkat budaya menabung sejak dini," ungkapnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, program ini diharapkan dapat menjadi sarana penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP), karena SimPel/SimPel iB ini memiliki karakteristik yang spesifik, seperti nama siswa yang tercatat sebagai pemilik rekening dan tercantum pada buku tabungan.

"Kegiatan aktivasi ini akan dilakukan berkelanjutan dengan target 16 kota di Indonesia sampai akhir 2015, yaitu Jakarta, Serang, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Palembang, dan Balikpapan, serta tujuh kota di Jawa Timur," ujar Muliaman. 



## “Akses Keuangan Agar Diperluas di Jayapura”

**G**uru ekonomi SMA dan guru IPS SMP di wilayah Jayapura mengikuti kegiatan *Training of Trainers* (ToT) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Horison Jayapura pada 5-6 Agustus 2015. Kegiatan tersebut diikuti oleh sedikinya 55 orang guru SMA dan 30 guru SMP.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mengikutsertakan peran dari Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerom, dan PGRI Kota Jayapura untuk mengundang para guru SMP dan SMA yang hadir.

Deputi Direktur Edukasi OJK, Jalius membuka kegiatan ToT tersebut, yang juga dihadiri oleh I Wayan Mudiya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Perwakilan PGRI Kota Jayapura Paulus Gandeguai, dan Iqbal Mudir, Kepala Subbagian Administrasi Kantor OJK Papua.






Dalam pertemuan tersebut hadir pula narasumber dari internal OJK, yaitu Rizki Yuniarini yang menyampaikan materi mengenai latar belakang, tugas, fungsi dan tujuan pendirian OJK, serta POKJA penyusun buku Mengenal OJK dan IJK tingkat SMP dan SMA, yaitu Hermansyah dari Bank Muamalat, Hotman Simbolon dari Bank Citibank, Anton Lie dari PT Asuransi Central Asia, Rofiq Aziz dari PT Pegadaian, dan Totok Subiyanto sebagai

narasumber Asosiasi Dana Pensiun Indonesia.

Narasumber lainnya yang menyampaikan paparan tentang Bursa Efek Indonesia adalah Deri Yustria, Sigit Sembodo dari PT Bussan Auto Finance, Suharyadi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, dan Lutfi Trizki dari Rumah Cerdas Finansial. Saat sesi pasar modal juga dihadiri oleh Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia

wilayah Papua.

Kegiatan terlaksana dengan baik dan peserta ToT sangat antusias dalam menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber. Pertanyaan yang diajukan pun cukup mendalam. Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan, terdapat pula harapan dari peserta agar akses keuangan lebih diperluas di wilayah Jayapura, sehingga dapat mendukung proses pembelajaran materi OJK dan IJK. 







# SimPel

## Simpanan Pelajar



\*Setoran Awal Rp 1.000

\*Bebas Biaya Administrasi



Direktur Utama BTN Maryono (dari kiri), Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin, Direktur Utama Bank Mandiri Budi G Sadikin, Direktur BCA Suwignyo Budiman, Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni dan Ketua Dewan Komisiner LPS C Heru Budiargo berbincang saat peluncuran Program Simpanan Pelajar (SimPel) di Jakarta, Selasa, 8 September 2015. OJK bersama industri perbankan mengembangkan produk tabungan yang diberi nama Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) yang merupakan salah satu upaya OJK dalam membangkitkan kembali "budaya menabung" sejak dini bagi pelajar.